

Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Sita Lima Mobil Mewah Riza Chalid

JAKARTA, BN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah kendaraan yang diduga milik tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid. Total ada lima kendaraan yang disita penyidik. Pantauan media Selasa (5/8/2025), lima mobil mewah itu diparkir berjejer di depan Gedung Jaks Agung Muda

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Mobil mewah Riza Chalid yang disita Kejagung. (ist)

PROYEK BKK DESA DOROGOWOK RP 1,475 M HANCUR

□ Kades dan Anggota DPRD Jatim PKS Patut Diperiksa



LIPUTAN KHUSUS

LUMAJANG, BN - Proyek Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dengan nilai sangat fantastis Rp 1.475.000.000,- (1,475 Miliar), sudah hancur. Diduga proyek dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bahkan proyek dari Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu dikerjakan asal jadi dan anggarannya diduga jadi bancakan oknum tidak bertanggungjawab.

KETERANGAN dihimpun Bidik Nasional (BN) himpunan BKK desa Dorogowok sepanjang 870 m banyak menyebutkan, proyek di

drainase tersebut tidak lurus berbelok-belok seperti ular kobra, karena pekerjaannya terburu-buru mengejar waktu dan tidak profesional. Diduga pekerjaan hanya formalitas saja terkesan hanya mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri sendiri dengan ngemplang uang negara/korupsi.

Menurut sumber BN, Kades Dorogowok Sura'i, awal perencanaan bersama-

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Kantor Desa Dorogowok

Novi Bendahara Desa bersama KAUR pada saat dikonfirmasi BN Selasa, (25/03/2025), pukul 12.06 WIB. (SON)

Pekerjaan drainase Dusun Panggung Gempol Hancur Lebur.

Polda Jatim Bongkar Beras Oplosan Produksi Sidoarjo



Kapolda Jatim Irjen. Pol. Nanang Avianto saat cek TKP. (ist)

SIDOARJO, BN - Upaya tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Jaks Agung dan Kapolri, untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan atau tidak sesuai mutu standar klaim kemasan pada saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025.

Kemudian ditindak lanjuti tim Satgas Pangan Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur langsung melakukan sidak di Pasar Tradisional

■ Bersambung ke hal.10 kol.1

TERSANGKA, EKS KEPALA BAPPEDA SIDOARJO BELUM DITAHAN

□ Kasipidsus Kejari Sidoarjo John Franky : Rawat Jalan, Kami Akan Cek Dulu Kesehatannya



Mantan Kepala Bappeda Sidoarjo, Heri Soesanto saat diperiksa di Persidangan Tipikor Surabaya. (Teddy Syah)



Kasipidsus Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi (tengah), bersama tim penyidik kejaksaan. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo belum melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, Heri Soesanto. Hingga kini, yang bersangkutan masih

menjalani rawat jalan usai perawatan di RSUD Notopuro Sidoarjo.

Heri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Oknum Polsek Bulu Temanggung Diduga Lepas Truk 'Penggarong' Solar Subsidi



Baju warna hitam topi putih sopir pengangsu Solar Subsidi di SPBU (Tim)

TEMANGGUNG, BN - Disaat awak media melintas di SPBU 44.562.08 Danupayan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah menemukan Truk pengangsu ('penggarong') solar subsidi, Selasa 29/7/2025.

Saat diwawancara awak media sopir pengangsu solar subsidi mengatakan, "memang benar saya lagi ngangsu solar subsidi mas, bos saya bernama Prasetyo orang Solo," ujarnya jujur.

Selanjutnya sejumlah awak media meluncur ke Polsek Bulu Kabupaten

Temanggung dengan maksud ingin melaporkan temuan tersebut.

Selang beberapa menit awak media datang bersama 2 anggota Polsek Bulu menggunakan mobil patroli, namun sangat disayangkan kinerja 2 anggota Polsek Bulu tidak bertindak sebagai Aparat Penegak Hukum yang semestinya, diduga kuat ada unsur kesengajaan melepaskan truk yang diduga mafia pengangsu solar.

Pasalnya, setibanya dilokasi 2 oknum anggota Polsek Bulu tidak turun dari mobil patroli, sama sekali tidak bertindak apapun, justru menyuruh sopir truk yang diduga ngangsu solar pergi ke Polsek tanpa dikawal

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Warga Pertanyakan Proyek "Siluman" Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kwaron Diwek



Proyek jalan hotmix Dusun Nglerup, Desa Kwaron diduga tidak sesuai spesifikasi, bahkan terkesan asal-asalan

JOMBANG, BN - Proyek peningkatan jalan hotmix Dusun Nglerup, Desa Kwaron, Kabupaten Jombang diduga dikerjakan secara asal-asalan bahkan diduga menyimpang dari spesifikasi. Pada proyek jalan hotmix tersebut tidak ditemukan papan nama proyek, sehingga layak di sebut proyek "Siluman".

Keterangan dihimpun Bidik Nasional (BN), Sayang anggaran negara yang diberikan agar bisa dinikmati warga setempat, ternyata pada pengerjaan proyek jalan hotmix itu di kerjakan kurang bagus, bahkan mutu kualitasnya buruk. Terkesan bila dipandang mata orang pasti geleng geleng kepala bila melihat proyek jalan aspal (hotmix) tersebut. Pengerjaan terkesan carut marut bila melihat cara penataan proyek hotmix di Dusun Nglerup, Desa Kwaron tersebut.

Proyek "Siluman" jalan hotmix tersebut terbilang dikerjakan oleh kontraktor nekat. Bahkan sejak awal pekerjaan hingga selesai warga tidak mengetahui sumber dananya dari mana

serta anggarannya berapa, karena tidak ada papan nama proyek.

Saat BN bertanya pada beberapa warga setempat, terkait anggaran dan dananya dari mana, warga tidak mengetahui anggarannya. "Anggarannya berapa dan darimana saya tidak tahu, yang mengerjakan juga bukan orang sini, habis dari sini pindah ke Dusun Kwaron," terang warga, Senin (21/7).

Masih di tempat yang sama, tak jauh beda dengan keterangan tetangganya, warga juga mengatakan, "pengerjaannya malam hari, belum ada satu bulanan, jalan ini pekerjaannya terkesan asal - asalan,

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Usut Alih Fungsi Lahan Sungai Asem, Timsus Kejari Geledah Kantor ATR/BPN Lumajang



Timsus Kejari saat Geledah Kantor ATR/BPN Lumajang. (son)

LUMAJANG, BN - Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi (TimSus) Kejaksaan Negeri Lumajang melakukan penggeledahan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lumajang pada Jumat 1 Agustus 2025. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam alih fungsi Sungai Asem menjadi kawasan kavling perumahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, Kosasih, menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus korupsi. "Kami telah melakukan upaya paksa di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lumajang untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini," ujarnya.

Dari hasil penggeledahan, TimSus Kejari Lumajang menyita beberapa dokumen penting, termasuk 3 bendel peta wilayah, 3 bendel permohonan sertifikat asal tanah, 1 lembar cetakan pola ruang dari ArcMap, dan 3 lembar cetakan peta pola ruang RT/RW

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

LOWONGAN WARTAWAN

Koran BIDIK NASIONAL Membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Ikan Lele 2/C14 Bluru Permai, Bluru Kidul, Sidoarjo atau Hubungi Bos EDY (HP/WA: 08123209649) email : bidiknasional@yahoo.com

Tukang Tagih Bank Daerah di Kabupaten Kediri Diduga Teror Guru saat Mengajar



Bukti LP Korban saat melapor ke Polres Kediri. (Nyoto BN)

KEDIRI, BN - Sungguh Ironis apa yang dialami seorang Guru MI Berinisial Z di Kabupaten Kediri, karena angsuran yang kurang, pihak Debt Collector (DC) Bank Daerah Kabupaten Kediri diduga minta Motor untuk jaminan karena keterlambatan bayar angsuran, padahal yang dijaminkan Sertifikat. Adanya ancaman

teror oleh pihak DC Bank Daerah Kabupaten Kediri membuat Z harus memberikan motor yang biasa dibutuhkan kerja sehari-hari. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 23 Juli 2025, saat dua petugas penagih mendatangi sekolah tempat Z mengajar. Mereka menagih utang secara terbuka di tengah proses belajar, meskipun kepala sekolah telah meminta agar penagihan ditunda hingga KBM selesai. Namun, permintaan tersebut diabaikan, dan penagih tetap dilakukan di hadapan siswa dan guru lainnya.

Z mengakui adanya tunggakan cicilan sejak April akibat kesulitan ekonomi, namun ia menyatakan se-

lama ini rutin melakukan pembayaran, meski terkadang tidak sesuai nominal. Bahkan, sebagai bentuk itikad baik, Z akhirnya menyerahkan dua motor miliknya karena dibawah tekanan meskipun diantara sendiri ke Bank Daerah, yakni Yamaha Vixion dan Honda Vario, untuk menutupi kewajiban.

Ironisnya, selain dua kendaraan tersebut, petugas juga menyita berbagai barang pribadi lain yang tidak tercantum dalam perjanjian pinjaman maupun akta jaminan. Penyitaan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, seperti akta fidusia atau putusan pengadilan, yang jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan prosedur yang berlaku.

Tak hanya itu, intimidasi juga dirasakan oleh istri Z. Salah satu petugas bahkan

melontarkan pernyataan yang sangat tidak pantas saat mendatangi rumah korban: "Kalau suami Anda mati, itu bisa selesai, Buk." Ucapan tersebut memicu trauma dan tekanan mental yang mendalam bagi istri Z, serta menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga.

Z akhirnya menempuh jalur hukum bukan semata untuk membela diri, tetapi sebagai langkah memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi konsumen kecil yang sering terpinggirkan. Saat di konfirmasi Sigit sebagai salah satu Direksi Bank Daerah Kabupaten Kediri mengatakan kepada koran ini bahwa kejadian ini sudah dilaporkan pada pihak kepolisian, dan kita hormati proses hukum yang berjalan, ungkapnya. (Nyoto

Sosialisasi Pembebasan Lahan Perhutani di KRPH Sampang dan BKPH Dander KPH Bojonegoro, Lancar



Sosialisasi pembebasan lahan Perhutani di KRPH Sampang dan BKPH Dander KPH Bojonegoro di pendopo Balai Desa Buntalan, Kamis (24/07/2025). (Foto: Pri BN Bojonegoro.)

BOJONEGORO, BN - Dalam Rangka memperkuat pertahanan negara, Kementerian Pertahanan melalui Perhutani dan Pemerintah Desa (Pemdes) Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro melaksanakan sosialisasi pembebasan lahan Perhutani di KRPH Sampang dan BKPH Dander KPH Bojonegoro yang akan digunakan atau dibangun Markas Batalyon pembangunan dan Brigif TP. 34 di kawasan Perhutani yang saat ini dikelola masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Acara diselenggarakan di pendopo Balai Desa Buntalan, Kamis (24/07/2025).

Kepala Desa Buntalan Kecamatan Temayang Bojonegoro, dr Sujoko dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai kebutuhan pemerintah untuk menyanggah ketahanan pangan rakyat dan pengamanan teritorial, negara membutuhkan Batalyon dan Brigif baru untuk menopang perekonomian.

"Namun demikian, secara ekonomi kita akan sedikit berkurang akibat pembebasan lahan garapan yang selama ini dikelola sebagai sumber mata pencarian yang akan terbengkalai. Akan tetapi ini dibutuhkan negara sehingga kita semua harus rela melepas garapan tersebut," ungkapnya.

Sementara, Pemerintah desa dan masyarakat yang

Kejari Sidoarjo Restorative Justice Tersangka Penggelapan Motor untuk Bayar Kos



Tersangka saat menerima berkas Restorative Justice dari Kejari Sidoarjo. (Foto: Teddy/BN.com)

SIDOARJO, BN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menerapkan pendekatan restorative justice terhadap kasus penggelapan sepeda motor operasio-

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Eksekusi Putusan MA, Kejari Sidoarjo Bakal Tahan Dirtek Perumda Delta Tirta



Terpidana Slamet Setiawan saat dilakukan penahanan di Kejari Sidoarjo. (Teddy)

SIDOARJO, BN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo memastikan akan melakukan eksekusi terhadap

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

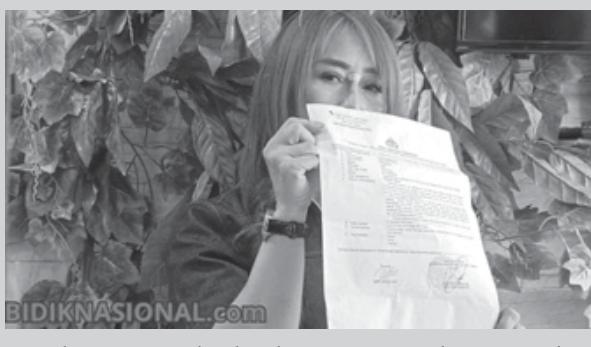
BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK
NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999
PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB :** Edy Sutanto. **PEMIMPIN PERUSAHAAN :** Teddy Syah Roni. **PENASEHAT HUKUM :** Yustinus Haryanto, SH. **REDAKTUR PELAKSANA :** Budi Santoso. **REDAKTUR :** A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhans, Agus. **TEAM LIPUTAN KHUSUS :** Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto. **JAWA TIMUR :** SURABAYA : Dynas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Nini Rachmawati. **SIDOARJO :** Nur Yahya. **GRESIK :** Ariadi AM, Subkan Arif. **PAMEKASAN :** Ainur Halis. **SUMENEP :** Adi Yusman, Ishak. **SAMPANG :** Hollilurohman. **MOJOKERTO :** Husnun. **JOMBANG :** Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. **NGANJUK :** Agung Moch. Suhadu, Sugiantoro, Dodik Andiyanto. **KEDIRI :** Nyoto Dharmawan. **TULUNGAGUNG/TRENGGALEK :** Nik Atin. **MADIUN :** Basuki. **NGAWI :** Leo Lunardi T. **MAGETAN :** Ashar AR. **PONOROGO :** Andhy Wijaya. **LAMONGAN :** Syaiful Anam, Sulistiowati, Arif Mustofa, Joko Santoso. **BOJONEGORO :** Priyanto. **MALANG RAYA :** Asep Sujana. **SUMEDANG :** Ernawan Hidayah. **SUBANG :** Tohi (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. **INDRAMAYU :** Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. **DEPOK :** Harahap (Kabiro), Fajar. **BEKASI :** Abdul Rachman. **KUNINGAN :** Edwar Panata Muda. **PURWAKARTA :** Anthon Pontoh, Endin. **BOGOR :** Liswandi (Kabiro), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. **JAKARTA/BANTEN :** Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. **BALI :** Agung Wiarto. **SULAWESI SELATAN :** Dikid Eko Sulistiwan. **WONOGIRI :** Heryanto. **SEMARANG RAYA :** Peni Kusumawati (Kabiro), Catur Prasetyo. **PEKALONGAN RAYA :** Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. **BATANG :** Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. **KENDAL :** Peni Kusumawati, Doni Kurniawati, Dwi Setiawati. **KALIMANTAN BARAT :** Sofyan Hadi. **KETAPANG :** Sukarto. **KALIMANTAN UTARA :** Syamsudin (Kabiro). **KEPRI : BENGKALIS :** Agung Mulyono. **KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN :** Handoko. **KEP. KEPATEN :** Amir Hamzah. **RIAU :** Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). **SUMATERA SELATAN : PALEMBANG :** Sirlani. **LAHAT/MUARA ENIM :** Adi Nurahman. **PAGAR ALAM :** Marleo Tanjung. **OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN :** M Azhary MY, OKU TIMUR : Nelsi Sri Wahyuni. **OKI :** Nurli Octari. **SUMATERA UTARA : KOTA MEDAN :** Muhammad Syafei Harahap. **LABUHANBATU :** M. Sukma (Kabiro). **PAKPAK BHARAT :** Tennen Tumangger (Kabiro), Dariono. **DELI SERDANG :** Heri Siswoyo. **ASAHAN :** Tumin P, Sandro Matanael Hulu, Hengky Ames. **NIAS UTARA :** Hadirat Syukur Harefa. **NIAS BARAT :** Odalige Zai. **TAPANULI SELATAN :** Amir Hamzah Nasution. **SUMATERA BARAT :** PASAMAN : Suryadarma (Kabiro), Refidinal. **LAMPUNG :** WAY KANAN : Aye M Jahri. **LAMPUNG TIMUR :** Nuhyin, Mueshin, Antoni. **LAMPUNG UTARA :** Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari Lestari. **LAMPUNG SELATAN :** Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. **LAMPUNG BARAT / PESISIR BARAT :** M. Taufik TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT : Indra Wijaya, Hendra Jaya. **PRINGSEWU :** Iskandar. **BANDAR LAMPUNG :** Suhartono Hariwibowo. **TANGGAMUS :** - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitewu. **SUBULUSSALAM :** Agus Daminto Bancin (Kabiro), Imran Cibro. **ACEH SINGKIL :** Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. **BIREUM :** Hendra S. **BANGKA BELITUNG :** Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. **JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT :** Joni Efendi. **NUSA TENGGARA BARAT :** MATARAM : Hidayatul Aini (Kabiro). **PAPUA :** Junjungan Silalahi. **LAYOUT/IT :** Nur Hayati PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN : Dita Zahra Amalia. **PENERBIT :** PT Bidik Nasional Pers (BNP). **AKTE NOTARIS :** LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. **SK MENKUMHAM PERUBAHAN :** No AHU-00010003.AH.01.02, Tahun 2020. **NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO :** 0220105231819. **NPWP :** 72.007.891.4-617.000. **ALAMAT :** Jl. Ikan Lele 2 Blok C No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec. Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. **JAKARTA :** Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. **BANK :** Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. **WEBSITE :** <https://bidiknasional.com>. **Percetakan :** PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com / bidiknasional1@gmail.com / bidiknasional2@gmail.com

Ditemukan Tanda Cupang di Dada, Suami Aniaya Istri di Sepanjang Sidoarjo



Korban saat memberikan keterangan pers di tempat salon kecantikannya. (Foto: ist)

SIDOARJO, BN - Seorang wanita pemilik salon kecantikan bernisial NH (45), warga Jl. Taman Permata Indah Blok-G, Sepanjang, Sidoarjo, melaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ke Polsek Taman pada Minggu (20/7/2025).

NH mengaku menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh FR (46), warga Pondok Buana Blok-Q, Sidoarjo, yang merupakan suaminya dalam pernikahan siri. Kejadian kekerasan tersebut terjadi di halaman rumah Korban. Akibat tindakannya FR, korban mengalami luka lebam di bagian bahu tangan kirinya.

"Jadi pada hari Minggu itu saya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami saya. Dia mencengkeram tangan saya dan mendorong hingga saya terpental dan menabrak pagar depan rumah," ungkap korban saat diwawancara, Rabu (30/7/2025).

Kekerasan tersebut dipicu oleh pertengkaran setelah NH menemukan tanda cupang merah di dada FR. Situasi ini menimbulkan kecurigaan terhadap kesetiaan FR.

"Awalnya saya curiga karena dia tidak seperti biasanya, tidak mau buka baju saat santai. Dan saat akan berhubungan pada dini hari Minggu itu, saya kaget melihat tanda cupang di dadanya, lalu kami bertengkar," lanjutnya.

Pertengkaran berlanjut hingga sore hari. Puncaknya, terjadi tindakan kekerasan pada pukul 19.00 WIB saat NH melerang FR keluar rumah. "Dia marah karena saya tidak mau diajak berhubungan malam itu. Saya curiga dia mau pergi menemui wanita lain yang meninggalkan tanda cupang itu. Karena saya larang, dia jadi emosi," ujar NH.

Usai insiden tersebut, NH melaporkan kejadian ke Polsek Taman untuk meminta perlindungan hukum. Pihak Polsek Taman merespons cepat dan mendatangi tempat kejadian perkara, setelah menerima laporan tersebut.

"Beruntung anggota Polsek datang ke lokasi. Katanya, ada tetangga yang mendengar keributan di rumah saya dan langsung melapor," terang NH.

Polsek Taman telah memeriksa korban dan menerbitkan Surat Pengaduan Masyarakat dengan nomor: LPM/235/VII/2025/POLSEK TAMAN/POLRES SIDOARJO, Senin (21/7). Selain itu, polisi juga membawa NH ke rumah sakit untuk melakukan visum atas luka yang dialaminya.

Diketahui, NH dan FR telah menjalani hubungan pernikahan siri sejak tahun 2023. Selama menjalin hubungan tersebut, keduanya kerap terlibat konflik. FR sendiri diketahui telah memiliki istri sah dan dua orang anak dari pernikahan resminya.

"Saya menerima dia sebagai suami meski dia punya istri sah. Tapi belakangan saya dengar dia punya kekasih lain lagi selain saya dan istri pertamanya," kata NH.

NH meyakini bahwa tanda cupang tersebut bukan berasal dari istri sah FR, melainkan dari wanita lain yang dugaannya ada kekasih barunya. Hingga Rabu (30/7/2025), Polsek Taman telah memanggil dan memeriksa dua saksi yang mengetahui kejadian kekerasan tersebut. "Hari ini dua saksi saya hadirkan sesuai permintaan penyidik. Lalu, dijadwalkan lagi, Sabtu (2/8/2025), FR akan dipanggil untuk dimintai keterangan," pungkas NH. (Teddy Syah)

Wabup Mimik : Tingkatkan Kompetensi dan Bentuk Siswa Sehat Jasmani Rohani



Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana. (Foto: ist)

SIDOARJO, BN - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana secara resmi membuka kegiatan Pengembangan Keprofesiensi Berkelaanjutan (PKB) bagi guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJO) menjang Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Sidoarjo, Senin (4/8/2025) di Pendopo Delta Wibawa.

Dalam sambutannya, Wabup Mimik menyampaikan apresiasinya kepada seluruh guru PJO yang terus berkomitmen dalam mendidik dan membina siswa, khususnya di bidang olahraga.

"Melalui kegiatan ini, saya berharap guru PJO semakin siap menghadapi tantangan dunia pendidikan yang dinamis. Guru harus terus belajar, memperbarui metode, dan meningkatkan kompetensi agar pembelajaran di sekolah semakin berkualitas dan membentuk siswa yang sehat jasmani dan rohani," ujar Mak Mimik, sapaan akrabnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Tirtio Adi, menyampaikan bahwa kegiatan PKB yang diikuti oleh 563 guru PJO ini merupakan program rutin untuk memperkuat kapasitas dan kualitas guru, meningkatkan profesionalisme guru PJO dalam mendukung pembelajaran yang aktif, sehat, dan menyenangkan.

"Guru PJO memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aktif. Melalui PKB ini, kami ingin para guru bisa terus berkembang, mengikuti perkembangan kurikulum, serta mampu menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik," terang Tirtio. (yah)

Bupati Sidoarjo Tinjau & Rehab Rumah Dua Warga Kurang Mampu di Kecamatan Tarik dan Gedangan



SIDOARJO, BN - Untuk memastikan bantuan dan bedah rumah dua warga di Kecamatan Tarik, Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung ke lokasi. Agar bantuan dan bedah rumah itu tidak salah sasaran maka Bupati Sidoarjo melakukan kunjungan lokasi di Desa Mindugading dan warga Singogalih.

Bupati Sidoarjo sangat semangat untuk melakukan bantuan kepada warganya yang rumahnya tidak layak huni. Di samping itu Bupati Sidoarjo memang mempunyai karakter sosial yang tinggi, memang beliau juga amanah menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kegiatan sosial.

Dua rumah warga kurang mampu di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, akhirnya mendapat bantuan rehabilitasi dari Baznas Sidoarjo.

Bantuan tersebut diberikan kepada rumah milik Sulikah, nenek berusia 82 tahun asal Desa Mindugading, serta rumah milik Slamet Agus Siswanto, warga Desa Singogalih. Kondisi kedua rumah ini memang sangat memprihatinkan. Terutama rumah Sulikah, yang hanya berdiri bambu dengan ukuran 5 x 4,5 meter. Rumah itu tampak rapuh, jauh dari kota layak untuk ditempati.

Senin (28/7), Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung meninjau kondisi rumah kedua warga tersebut. Ia datang bersama Ketua Baznas Sidoarjo, M. Chasbil Azis Salju Sodar serta jajaran Dinas Sosial Sidoarjo. Saat melihat langsung kondisi rumah yang tidak layak huni itu, raut wajah Bupati Subandi tampak diliputi keprihatinan. Ia menyampaikan bahwa program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Lewat program bedah rumah ini, kami ingin memastikan setiap warga Sidoarjo bisa tinggal di rumah yang aman, nyaman, dan layak. Saya tidak ingin ada warga kita yang hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak," tegasnya.

Bupati Subandi juga mengajak semua pihak untuk ikut mendukung program ini. Ia meminta camat dan kepala desa agar lebih proaktif mendata warganya yang masih tinggal di RTLH. Tak hanya itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui ada tetangga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

"Jika ada tetangga yang rumahnya tidak layak, segera laporkan ke kelurahan atau kecamatan. Kami akan tindak lanjut, agar segera bisa dilakukan renovasi," ujarnya penuh empati.

Di tengah proses peninjauan, kisah haru datang dari Eny, anak kedua Sulikah. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan bahwa ibunya sudah berkali-kali diajak untuk tinggal bersamanya maupun dengan saudara-saudaranya. Namun, sang ibu selalu menolak dengan alasan tidak betah jika harus tinggal di rumah anak-anaknya. "Ibu mboden purun kulo ajak tilem teng griyo kulo (Ibu tidak mau saya ajak tidur di rumah saya - red)," ungkap Eny lirih, menirukan ucapan ibunya.

Menurut Eny, hampir dua tahun terakhir ibunya memilih tinggal sendiri di rumah sederhana itu. Sebelumnya, Sulikah sempat tinggal bersama salah satu saudaranya.

Namun sejak ayahnya meninggal, ia memutuskan kembali ke rumah lamanya, meskipun kondisinya sempit dan memprihatinkan.

"Semua anaknya sebenarnya khawatir, apalagi kalau hujan deras. Kami selalu memikirkan keselamatannya. Tapi ibu selalu berkata, 'aku

tinggal nang kene ae'.

"Itulah keinginannya, meskipun kami merasa sedih melihat kondisinya," tutur Eny dengan suara bergetar.

Kisah ini menjadi pengingat bahwa di tengah pesatnya pembangunan, masih ada warga yang membutuhkan uluran tangan. Dengan adanya program bedah rumah dari Pemkab Sidoarjo dan Baznas, harapan untuk hidup lebih layak akhirnya bisa terwujud bagi Sulikah dan Slamet Agus Siswanto.

Bapak Sujani Bupati swasta dan masyarakat Sidoarjo sebagai pemerhati kegiatan Bupati Sidoarjo dalam kegiatan sosial, Sujani mengapresiasi Bupati H. Subandi dalam semua kegiatan sosial. Termasuk kegiatan di Kecamatan Tarik ini saya acungi jempol kepada bapak Bupati karenamasyarakat Sidoarjo masih banyak yang harus di bantu pungkas Sujani.

Masyarakat Sidoarjo untuk kesejahteraannya belum merata, masih banyak di wilayah pedesaan yang masyarakatnya kurang mampu. Sehingga mereka perlu sekali bantuan. Apapun alasannya yang mananya masyarakat kurang mampu apabila ada bantuan mereka sanag senang dan bahagia sekali.

Dari sisi sosial bupati pun sangat diapresiasi oleh masyarakat Sidoarjo. Masyarakat Sidoarjo dimasa sekarang banyak meningkat taraf prekonomiannya, tapi masih tetap ada saja yang kekurangan. Dengan terobosan dan langkah bupati seperti ini maka pihak terkait seperti dinas sosial juga sangat berperan untuk mendata dan mengatasi masyarakat yang kurang mampu ini. Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, M.Kn, memang cocok dan pantas jadi pimpinan Kabupaten Sidoarjo karena dalam menjalankan tugas sudah amanah.

Untuk data jumlah penduduk Sidoarjo yang kurang mampu dan berhak menerima bantuan menurut keterangan kepala dinas sosial, Drs. H. Ahmad Misbachul Munir dikatakan, "Kalaun tahun kemarin sekitar 580.000 untuk tahun 2025 masih belum tahu karena masih harus membuka data dulu, dan data sudah dianulir," jelasnya.

Kepala dinas sosial kabupaten Sidoarjo waktu dikonfirmasi lewat telpel seluler menjelaskan, "Ya mas mohon maaf saya lagi undangan acara di kantor kejaksaan negeri Sidoarjo. Kalau sampai konfirmasi terkait data penduduk Sidoarjo yg kurang mampu dan berhak menerima bantuan saya harus buka data di komputer dulu, kalaun tahun 2024 kemarin ada sekitar 580 ribuan, um untuk tahun sekarang saya belum tahu karena sudah dianulir nunggu info dari saya," pungkasnya.

Untuk meningkatkan dan bisa melayani masyarakat yang kurang mampu dalam memberikan santunan sehatnya bupati dan wabup juga bekerja sama monitoring kelokasi masyarakat yang tidak mampu.

Bupati dan Wabup kompak monitor penyaluran bantuan pangan di Sidoarjo, agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran dan untuk memastikan penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat tepat sasaran, Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana kompak turun langsung ke lokasi penyaluran, Rabu (30/7/2025).

Bupati Subandi memantau penyaluran bantuan pangan di Desa Gedangan. Yakni Desa Tebel, Desa Keboansikep, dan Desa Wedi. Sementara Wabup Mimik Idayana memantau penyaluran di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, dan Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono.

Selain untuk memastikan penyaluran bantuan beras tepat sasaran, Bupati Subandi juga ingin memastikan seluruh warga Sidoarjo terlindungi BPJS Kesehatan.

Bupati Subandi menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan bersama kali ini untuk alokasi bulan Juni dan Juli. Perbulan pemerintah menyalurkan beras sebanyak 10 kg. Sehingga kali ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) langsung menerima 20 kilogram beras.

"Penyaluran bantuan pangan beras pemerintah pusat harus diikuti bersama. Jangan sampai bantuan tersebut salah sasaran atau diterima oleh yang tidak berhak. Bantuan harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Karena bantuan ini tujuannya untuk membantu ekonomi warga dalam mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari," kata Subandi.

Dia juga meyakinkan kualitas beras bantuan yang diberikan sangat baik. Beras jenis medium berkualitas. Bupati mengecek sendiri kondisi berasnya. Sangat layak dikonsumsi. Oleh karenanya ia meminta beras



yang diterima dapat dikonsumsi sendiri. Jangan sampai dijual. "Beras nih buat dikonsumsi damel keluarga sendiri ngeh. Kalau pulang dari sini jangan mampir toko, terus berasnya dijual," pesan bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati H. Subandi juga memastikan masyarakat terlindungi BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jika masih ada yang belum, diminta agar segera menemui kepada desa setempat. Minta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar terdaftar dalam kepersertaan BPJS Kesehatan.

Pesan serupa disampaikan Wabup Mimik Idayana saat monitoring bantuan pangan beras di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran dan Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono. Wabup menegaskan bantuan beras untuk warga ini agar dikonsumsi sendiri dan tidak boleh dijual. "Saya pesan agar jangan dijual, manfaatkan untuk konsumsi sendiri," pesannya.

Mimik menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan distribusi bantuan sosial berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan.

Dalam kunjungannya, Mimik Idayana menyapa langsung warga penerima manfaat, memastikan proses pembagian berjalan tertib, dan mengecek kualitas beras yang diterima. "Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, dalam kondisi layak konsumsi dan jumlah yang sesuai," ujarnya.

Kepada warga Mimik juga berpesan agar jika ada warga yang melihat jalan lubang, mati lampu, hingga warga yang butuh bantuan segera lapor agar segera ditindaklanjuti. "Saya juga mohon agar bantu doa untuk pak Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo agar selalu sehat untuk memimpin Sidoarjo, dan menyajikan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," pesan Wabup.

Siti Nurhayati (52), salah satu warga Jumputrejo mengungkapkan rasa terima kasih karena bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. "Alhamdulillah dapat bantuan beras. Bisa buat hemat belanja. Terima kasih Bu Wabup dan pemerintah," ucapnya sambil tersenyum.

Hal serupa disampaikan Widarti, salah satu penerima bantuan bersyukur kembali mendapatkan bantuan beras. Dua tahun lalu bantuan serupa juga diterimanya. Selama setahun ia memperoleh 10 kg beras setiap bulannya. "Riyen nate angsal hampir setahun, terus wonten satu tahun setengah mboten angsal, sakniki baru angsal male," ucapnya.

Widarti mengungkapkan kalau bantuan tersebut sangat berarti bagi ny. Sangat membantu perekonomian dirinya yang harus berjuang sendiri semenjak suaminya meninggal. Diungkapkannya bahwa sehari ia harus masak 1 kg beras untuk kebutuhannya bersama tiga anaknya. "Alhamdulillah angsal bantuan beras neten niki, 10 kilo bisa dibuat 10 hari, sehari kulo masak 1 kilo beras damel tigo anak kulo," kata dia.

H. Triyono kepala desa tebel kecamatan gedangan kabupaten Sidoarjo merasa sangat senang atas bantuan pemkab Sidoarjo kepada warganya. "Saya sebagai kepala desa sangat senang kepada bapak bupati Sidoarjo, pemerintah kabupaten Sidoarjo yang sudah mau turun lansung untuk monitoring bantuan kepada warga saya," jelas H. Triyono. (adv/yah)



Wagub Jatim Dorong Lulusan STIDKI Untuk Merdeka Berkarir Songsong Masa Depan Cerah



Wagub Emil saat memberikan selamat kepada wisudawan. (Foto: ist)

PAMEKASAN, BN -

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong para lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Al-Hamidy Pamekasan untuk menyongsong masa depan dengan optimisme, keberanian, dan kreativitas, serta membangun karir secara merdeka dan adaptif berbasis

perkembangan teknologi.

Hal ini disampaikan Emil saat memberikan orasi ilmiah dalam acara Wisuda Ketiga STIDKI Al-Hamidy Program Studi Komunikasi dan Penyebarluasan Islam yang digelar di kampus STIDKI Al-Hamidy, Kabupaten Pamekasan, Kamis (31/7).

Dalam orasinya, Emil menekankan bahwa kelulusan bukanlah akhir, me-

lakukan titik awal dalam menentukan arah hidup dan karir secara mandiri. Para lulusan, katanya, harus membebaskan diri dari ketergantungan pada jalur karir konvensional dan mulai membuka peluang baru sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang diyakini.

"Wisuda ini bukan akhir, tapi awal dari kemerdekaan Anda dalam menentukan arah karir. Jangan hanya menunggu peluang, ciptakan peluang. Merdeka berkari artinya bebas memilih jalan kontribusi yang sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang diyakini," ujar Emil.

Ia juga mengingatkan pentingnya membuka diri terhadap berbagai peluang lintas disiplin. Di era teknologi yang berkembang pesat,

kemampuan untuk membaca kebutuhan zaman dan meningkatkan keterampilan secara berkelanjutan menjadi sangat krusial, bahkan di luar bidang studi asal.

"Latar belakang akademik itu penting, tapi bukan batas. Dunia saat ini menuntut fleksibilitas dan kemauan untuk terus belajar. Maka, tingkatkan skill Anda sesuai dengan kebutuhan zaman, baik itu di bidang teknologi digital, komunikasi massa, konten kreatif, maupun kepemimpinan sosial," tegasnya.

Emil menjelaskan bahwa era digital telah menciptakan ruang-ruang baru yang sangat potensial, termasuk bagi lulusan komunikasi dan penyebarluasan Islam yang mampu memahami teks agama sekaligus konteks sosial yang terus berubah," jelasnya.

Emil juga memaparkan inisiatif JATIM INFINITY 2025, program Pemprov Jatim untuk memperluas akses internet terutama di wilayah-wilayah blank spot seperti daerah pegunungan. Menurutnya, digitalisasi tidak cukup hanya soal jaringan, tapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam menghasilkan konten yang berkualitas dan berdampak positif.

"Transformasi digital bukan hanya soal koneksi, tapi juga tentang kapasitas dan konten. STIDKI punya peran penting dalam melahirkan generasi komunikator Islam yang mampu memahami teks agama sekaligus konteks sosial yang terus berubah," jelasnya.

Menutup orasi ilmiahnya, Emil mengajak para lulusan

untuk terus belajar, menjunjung tinggi etika digital, dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana penyampaian pesan-pesan bermakna yang membangun peradaban.

Ia juga mengapresiasi civitas akademika STIDKI Al-Hamidy atas dedikasinya dalam membimbing mahasiswa menjadi insan yang berilmu, berintegritas, dan siap menjadi agen perubahan.

"Songsong masa depan dengan percaya diri. Merdeka berkari adalah jalan untuk memberi kontribusi tumpang tindih bagi generasi komunikator Islam yang mampu memahami teks agama sekaligus konteks sosial yang terus berubah," jelasnya.

"Songsong masa depan dengan percaya diri. Merdeka berkari adalah jalan untuk memberi kontribusi tumpang tindih bagi generasi komunikator Islam yang mampu memahami teks agama sekaligus konteks sosial yang terus berubah," jelasnya.

Banyuwangi Jadi Laboratorium City Branding, Puluhan Daerah Ikut Belajar

BANYUWANGI, BN - Keberhasilan Banyuwangi membangun city branding dilirik banyak daerah untuk belajar. Mereka mengikuti Executive Education Program (EEP) yang dihelat oleh City Branding Institute, Jumat-Sabtu (1-2/8/2025). "Banyuwangi bisa jadi laboratorium yang bagus bagi daerah yang ingin membangun City Branding dari nol," Yuswohadi, salah satu penggaras City Branding Institute.

Menurut Yuswohadi, city branding adalah strategi menyeluruh untuk membangun citra dan identitas unik sebuah kota agar dikenal, diminati, dan dipercaya oleh dunia. Menurutnya, Banyuwangi adalah contoh daerah yang berhasil melakukan hal tersebut, sehingga sukses bertransformasi dari kota santet, menjadi daerah yang dikenal luas karena pariwisatanya.

"Banyuwangi sukses bertransformasi. Dari tidak punya (destinasi dan atraksi), kemudian diciptakan hingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini bisa menjadi role model untuk city branding di Indonesia," kata pakar branding dan marketing tersebut.

Program EEP City Branding ini menghadirkan tokoh-tokoh berpengalaman sebagai mentornya. Seperti Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI 2014-2019, Abdullah Azwar Anas, Menpar RB 2022-2024, serta Sigit Pramono, Founder Jazz Gunung.

Pada angkatan pertama, EEP City Branding diikuti oleh 30 peserta. Mereka adalah para pengambil kebijakan dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Kabupaten Lampung Selatan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Kota Serang.



Executive Education Program (EEP) yang dihelat oleh City Branding Institute, Jumat-Sabtu (1-2/8/2025).

Selama dua hari, peserta tersebut mengikuti pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), memanfaatkan template strategi praktis, dan melakukan kunjungan ke destinasi unggulan Banyuwangi untuk mempelajari penerapan nyata city branding. Salah satunya, ke pendopo dan bertemu Bupati Banyuwangi, Ipuuk Firstiandani, Jumat malam (2/8/2025).

Arief Yahya, Menteri

Pariwisata 2014-2019, menambahkan city branding menjadi alat strategis untuk memposisikan daerah di tengah persaingan global. "Peningkatan reputasi daerah sebesar 10% mampu mendorong kunjungan wisata hingga 11% dan investasi hingga 2%. Itulah kekuatan city branding," kata Arief Yahya.

City branding tidak hanya soal promosi wisata, tetapi strategi jangka panjang untuk mengangkat daya saing daerah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdullah Azwar Anas yang dalam sepuluh tahun memimpin Banyuwangi (2010-2020) berhasil menyulapnya dari kota mistik menjadi majestic. "City branding bukan hanya soal promosi, ini soal menyelaraskan seluruh elemen kota, mulai dari alam, budaya, hingga layanan publik, sehingga memberikan pengalaman menyeluruh bagi warga dan pengunjung," tegas penulis buku Anti Mainstream Marketing tersebut.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuuk Firstiandani sangat mengapresiasi program tersebut. Ipuuk juga berterima kasih Banyuwangi dipilih sebagai tuan rumah sekaligus obyek pembelajaran kegiatan ini. "Praktik baik dari kami, silakan diambil. Semoga bermanfaat bagi daerah Bapak/Ibu. Namun kami pun masih jauh dari sempurna, dan masih terus berbenah ke depannya," kata Ipuuk. (Dj/edy)

Kapolresta Banyuwangi Pimpin Apel Jam Pimpinan, Tekankan Kesehatan dan Kinerja Humanis

BANYUWANGI, BN - Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., memimpin Apel Jam Pimpinan di halaman Mapolresta Banyuwangi, Senin (4/8/2025). Dalam arahannya, Kapolresta Banyuwangi menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota atas pelaksanaan pengamanan kegiatan Tour de Banyuwangi Ijen (TDBI) 2025, sebuah ajang balap sepeda internasional yang berlangsung sukses dan aman.

"Terima kasih atas dedikasi dan sinergi dalam mendukung suksesnya event TDBI. Kita tunjukkan bahwa Polresta Banyuwangi siap mengamankan agenda berskala internasional de-



Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., memimpin Apel Jam Pimpinan di halaman Mapolresta Banyuwangi, Senin (4/8/2025)

ngan baik," ujar Kapolresta.

Kapolresta Banyuwangi juga menyoroti pelaksanaan pengururan arus lalu lintas di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Kapolresta minta seluruh personel tetap menjaga kondisi fisik agar dapat menjalankan tugas

dengan optimal. "Kesehatan adalah modal utama dalam bertugas, apalagi di lapanan. Pastikan tubuh fit saat menjalankan pengamanan, terutama di titik-titik padat," imbuhnya.

Terkait pemeliharaan Harkamtibmas (Pemelihara-

raan Keamanan dan Keterbitan Masyarakat), Kapolresta Banyuwangi mengingatkan tentang kegiatan seperti pawai budaya dengan penggunaan sound system berlebihan (sound horeg). Kapolresta meminta agar kegiatan masyarakat tetap dalam batas waktu dan tidak mengganggu kenyamanan publik. "Kegiatan masyarakat harus tetap kita fasilitasi, namun tidak boleh mengganggu ketertiban umum," tegas Kapolresta.

Apel Jam Pimpinan rutin dilaksanakan sebagai sarana konsolidasi dan evaluasi internal sekaligus peneguhan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banyuwangi. (Dj/Swd)

Tingkatkan Layanan, UPPKB Timbang Watu Dodol Ketapang Laksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor

BANYUWANGI, BN - UPPKB Timbang Watu Dodol BPTD, Kementerian Perhubungan Darat melaksanakan rapat koordinasi bersama ASDP Cabang Ketapang Banyuwangi, Satlantas Polresta Banyuwangi, Polsek KP.3 Tanjungwangi, Dishub Banyuwangi, UPT P3 Dishub Provinsi Jatim, dan Wasatpel Pelabuhan Ketapang.

Rapat koordinasi digelar dalam rangka agenda peningkatan layanan di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang serta pembahasan mekanisme pemasangan stiker untuk pemilahan Tonase dibawah 35 ton di MB, sedangkan 35 ton ke atas ke LCM untuk kendaraan angkutan barang yang akan di Pelabuhan Ketapang.

"Terimakasih, kita melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pada hari Minggu, tanggal 3 Agustus 2025, sekira pukul 10.00 WIB di Kantor UPPKB Watu Dodol Ketapang," jelas Oni Suryanto, Minggu siang (3/8/2025).

Hasil kesimpulan rapat koordinasi dengan Stakeholder terkait sambungnya, dengan adanya pelaksanaan pemilahan stiker dengan membuat grup WA antar instansi, satu hari dua Sip, menambah bantuan anggota dari ASDP Ketapang, Dishub Banyuwangi, Dishub Provinsi Jatim.

"Tentunya dari Polri - TNI akan mobiling membantu kendaraan masuk di Timbang, untuk pemasangan stiker di pojok kanan bawah depan, dan tidak mengganggu pandangan sopir/ driver, jadi stikernya ada dua, yang mana kendaraan angkutan barang mau masuk di pelabuhan Ketapang, kapasitas tonase di bawah 35 ton masuk ke MB sedangkan 35 ton keatas masuk di LCM, dan muatan yang cepat busuk prioritas karenanya batas waktu, dan keperluan Tenda sepatuk disediakan dari ASDP Ketapang," ungkapnya.

Sejauh itu tentunya kata dia, "informasi selanjutnya di mulai kegiatan menunggu persetujuan Kapolresta



Rakor Lintas Sektor UPPKB Timbang Watu Dodol Ketapang. (dj)

stiker warna hijau untuk kendaraan barang dibawah 35 ton, sedangkan stiker warna merah sumbu tiga 35 ton keatas, dan dipisahkan jalur kiri dan jalur kanan, yang kekiri masuk di MB dan yang kekanan menuju ke LCM, kami berharap untuk pengemudi, sopir/ driver mulai angkutan orang maupun angkutan barang, patuh rambu-rambu lalu-lintas, dan ikuti arahan Petugas, jangan sekali-kali ngeblong/ nyalip, saling menghargai sesama pengguna jalan", pungkasnya. (Dj)

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

stiker warna hijau untuk kendaraan barang dibawah 35 ton, sedangkan stiker warna merah sumbu tiga 35 ton keatas, dan dipisahkan jalur kiri dan jalur kanan, yang kekiri masuk di MB dan yang kekanan menuju ke LCM, kami berharap untuk pengemudi, sopir/ driver mulai angkutan orang maupun angkutan barang, patuh rambu-rambu lalu-lintas, dan ikuti arahan Petugas, jangan sekali-kali ngeblong/ nyalip, saling menghargai sesama pengguna jalan", pungkasnya. (Dj)

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "sedangkan

Banyuwangi, karena pada saat ini masyarakat penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangat padat, jadi kita segera melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya," jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, "



Komisi III DPRD Kota Bandung Sosialisasikan Perwal RDTR 2024-2044

BANDUNG, BN - Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menjadi narasumber Sosialisasi Perwal Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung 2024-2044, di Auditorium Balai Kota Bandung, Senin, 28 Juli 2025.

HADIR menjadi narasumber sosialisasi Perwal ini Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung H. Sutaya, S.H., M.H., dan Rendiana Awangga. Acara ini dibuka Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen, dan dihadiri Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Bambang Sugihari, serta perwakilan OPD dan aparatur kewilayahan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung H. Sutaya menuturkan, sosialisasi ini adalah momentum yang baik setelah hadirnya Perwal RDTR ini. Penekanan sosialisasi ini tentang aparatur yang terbatas untuk menjangkau masyarakat. Ia pun menyampaikan penghormatannya kepada camat dan lurah yang ikut hadir dalam acara itu, baik secara langsung maupun daring.

"Kami harapkan seluruh stakeholder bisa ikut sosialisasi karena tanpa bantuan lurah dan camat, sulit untuk menjangkau publik secara luas. Kami pun masih mendapatkan keluhan dari masyarakat yang tidak memahami peraturan ini. Maka dibutuhkan bantuan

KONSISTENSI

Masih di tempat yang



Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menjadi narasumber Sosialisasi Perwal Nomor 29 Tahun 2024, di Auditorium Balai Kota Bandung, Senin, 28 Juli 2025. (Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung).

sama, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga menilai Perwal ini sudah menjadi milik warga Kota Bandung. Sehingga, keterlibatan seluruh elemen akan semakin melengkapi tegaknya aturan ini di lapangan.

Perwal RDTR ini juga selaras dengan keberadaan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035.

"Setelah tiga periode saya di DPRD, ini merupakan Perda terlama yang dibahas. Sampai ada pergantian ang-

gota Pansus. Ini menunjukkan bahwa Perda ini tidak bisa dibahas sembarangan, tidak bisa dianggap ringan dan mudah. Ketika Perda dan Perwal ini disusun, akan mengikat lintas generasi hingga 2044. Ini menjadi warisan bagi masyarakat Kota Bandung yang akan tinggal dan hidup di masa mendatang," tutur pria yang biasa disebut Kang Awang itu.

Yang menjadi catatan dari DPRD, ia melanjutkan, bahwa dewan menekankan pentingnya konsistensi Pemkot beserta OPD terkait dalam menjalankan regulasi ini. Kompleksitas kota de-

ngan penduduk hampir 2,6 juta ini tidak sebanding dengan luas lahan yang tersedia. Berbeda dengan kota besar lain seperti Surabaya yang lebih tertata karena memiliki luas lahan lebih dari dua kali lipat Kota Bandung.

Persoalan tata ruang ini erat dengan penyelesaian masalah macet, banjir, kawasan kumuh, dan masalah mendasar lainnya. Dengan lahan terbatas akan sedikit sulit untuk Kota Bandung melakukan revitalisasi dan penataan. Maka konsistensi implementasi Perda dan Perwal RDTR akan menjadi

semangat untuk membangun kota yang lebih nyaman untuk ditinggali warga Bandung.

Kang Awang menambahkan, Kota Bandung memiliki banyak peraturan bagus. Tetapi sebagus apapun peraturan tidak akan dirasakan manfaatnya jika tidak dilaksanakan secara konsisten. Selama ini, banyak sekali peraturan yang dilanggar karena kurangnya pengawasan.

"Maka kami mendorong teman-teman OPD, juga di Satpol PP dan Dic平ta Bintar agar pengawasan ini lebih konsisten dan melibatkan lintas sektoral, baik di tingkat kewilayahan dan masyarakat, sehingga pelanggaran bisa diantisipasi dengan melakukan tindakan preventif. Tidak mungkin bangunan didirikan dalam satu malam. Jadi jangan sampai sudah terbangun baru rame. Saya ingin hal itu bisa dihindari. Bandung tidak boleh acak-acakan lagi," tuturnya.

Dalam rancangannya, RDTR Kota Bandung ini akan mengatur banyak hal, dari mulai merancang zonasi wilayah, jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan jalan, jaringan sampah, hingga jaringan transportasi.

Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen mengatakan, RDTR ini dibentuk untuk merancang pembangunan Kota Bandung. "Harusnya ini lurah dan camat sangat mengeri rancangan ini, karena RDTR ini adalah induk dari perencanaan di kota ini," ujarnya.

(ADV/San)

Bupati Pelalawan Pimpin Apel Siaga Karhutla Tahun 2025

PELALAWAN, BN - Pemerintah Kabupaten Pelalawan menggelar Apel Siaga Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Pelalawan, Kamis (24/7/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri.

Apel siaga ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, para kepala OPD, Satpol PP, BPBD, Damkar, Manggala Agni, pimpinan perusahaan, para camat, serta unsur TNI dan Polri.

Dalam amanatnya, Bupati H. Zukri menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terlebih di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pelalawan.

"Masyarakat berharap kepada kita semua agar Kabupaten Pelalawan terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, mari kita awali segala upaya ini dengan memperbanyak doa kepada Allah SWT, memohon agar kita semua dilindungi dan diturunkan hujan guna membantu pencegahan dan penanganan karhutla," ujar Bupati.

Bupati meminta seluruh tim pencegahan dan penanganan



Bupati Pelalawan H. Zukri saat memimpin apel Siaga Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati, Kamis (24/7/2025). Foto: ist

dalam kondisi aman, meningkatkan patroli siaga, dan memastikan seluruh peralatan pemadaman siap digunakan. "Kondisi cuaca panas saat ini sangat rawan. Sedikit saja ada pemantik api, bisa langsung terjadi kebakaran. Karena itu patroli harus diperketat dan peralatan harus dalam kondisi stand by," tegaskan Bupati.

Bupati juga mengajak semua pihak mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Damkar, Manggala Agni, dan seluruh elemen perusahaan untuk bersatu dan tidak saling menyalahkan apabila terjadi kejadian di lapangan.

"Memang ini pekerjaan berat, tapi ini tugas yang mulia. Ini untuk kepentingan masyarakat. Jika Karhutla tidak bisa kita atasi, dampaknya sangat luas, bukan hanya pada lingkungan, tapi juga kesehatan, sosial, dan ekonomi Masyarakat," tutup Bupati. (js)

Serahkan SK 23 CPNS dan 84 PPPK, Bupati Zukri Berpesan ; Bekerjalah Dengan Tulus dan Ikhlas

PELALAWAN, BN - Bupati Pelalawan H. Zukri langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi tahun 2024 dan Surat Keputusan (SK) Perubahan Unit PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 di Auditorium kantor Bupati Pelalawan, Jum, at 4/7/2025. (Foto: ist)



Bupati Pelalawan H. Zukri saat menyerahkan SK CPNS Formasi tahun 2024 dan SK Perubahan Unit PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 di Auditorium kantor Bupati Pelalawan, Jum, at 4/7/2025. (Foto: ist)

Penyerahan SK diterima langsung oleh sebanyak 23 orang lulusan CPNS dan 84 orang SK perubahan penempatan tenaga P3K fungsional Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Jum, at 4/7/2025.

Kepala Badan Kepega-

waian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Darlis SP, M.Si, mengatakan, penetapan kebutuhan PNS di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 59 poin ayat (2) bahwa pelamar

pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan. Dimana si pelamar harus bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkatnya.

Sementara Bupati Pelalawan H. Zukri mengucapkan selamat atas terpilihnya Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. "Kalian adalah orang-orang hebat terpilih untuk bergabung di pemerintahan kab Pelalawan dan saya berharap dapat memajukan daerah ini," ucapnya.

Bupati Pelalawan juga

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

Progress 85 Persen, Proyek Penataan Lapangan Umum Sepak Bola Penebel Ditargetkan Selesai Agustus



Lokasi lapangan umum olah raga Penebel paving jogging track sudah hampir selesai dan juga planter box sudah tertanam tanaman kacang serta lampu penerang taman," Sabtu, (26/07/2025). (Awil)

BALI, BN - Lapangan umum sepak bola Penebel yang dulunya tidak terurus dan tidak terawat banyak tumbuh tanaman liar di sekitar lapangan serta pohon besar, muncul ide dan gagasan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya untuk melakukan penataan lapangan Penebel, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) kabupaten Tabanan.

Untuk menata dan memperindah lapangan umum Penebel seluas 1,4 hektar pemerintah kabupaten (Pemkab) Tabanan mengucurkan anggaran sebesar 2 miliar lebih yang bersumber dari dana APBD daerah.

Dari pantauan awak media BN di lapangan pekerjaan sudah berjalan selama 4 bulan lebih, pemasangan beton U Ditch saluran resapan air yang terpasang melintang di bawah lapangan sudah selesai dikerjakan dan di timbun kembali dengan tanah, Sabtu (26/07/2025).

Proyek pekerjaan penataan lapangan umum sepak bola Penebel SPMK dimulai pekerjaan 19 April 2025, dengan masa pelaksanaan pekerjaan 120 hari kalender, dikerjakan oleh CV. HERWINA KARYA dengan nilai surat pesanan Rp. 2.191.011.000,00 dari nilai pagu anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,00 bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabanan tahun 2025, progress pekerjaan saat ini kurang lebih 85 persen dan diperkirakan akan selesai pada 11 Agustus sesuai dengan kontrak kerja dengan masa pemeliharaan 1 tahun.

Selain itu, pelaksanaan lapangan Wayan Sudarsana juga menyampaikan selama dalam proses melaksanakan pekerjaan sempat mendapat kendala faktor cuaca hujan sehingga membuat tanah berlumpur dan sulit untuk melakukan proses pekerjaan pembersihan akar pohon yang tertanam, serta pemindahan tiang kabel pln dan provider," terangnya.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRPKP kabupaten Tabanan, Made Adnyana saat dikonfirmasi awak media menyampaikan secara mayor pekerjaan proyek penataan lapangan umum Penebel meliputi jogging track, planter box, penataan parkir, perbaikan drainase.

"Proyek penataan lapangan umum sepak bola Penebel itu adalah ide dan gagasan dari Bapak Bupati, bahwa kedepan akan dibangun lapangan sarana fasilitas tempat olah raga gratis disetiap kecamatan," terang Adnyana.

Diketahui bahwa pekerjaan penataan lapangan umum sepak bola Penebel sesuai dengan SPMK dimulai pekerjaan 19 April 2025, masa pelaksanaan pekerjaan 120 hari kalender, berakhir masa kontrak pekerjaan 11 Agustus 2025, dengan masa pemeliharaan 1 tahun.

"Dengan jumlah anggaran segitu tahun ini hanya bisa melakukan penataan jogging track, penataan parkir, perbaikan drainase, serta planter box dengan penanaman cabe buya dan kacang. Sedangkan untuk pekerjaan tribun penonton, penataan rumput lapangan tidak masuk dalam pekerjaan tahun ini," imbuh Adnyana.

Pekerjaan fisik tahun ini di bidang cipta karya meliputi Penataan Parkir RSUD Tabanan Ex Dinas Pariwisata Tahap II, Penataan Halaman Mall Pelayanan Publik, Rehab Rumah Dinas Wanaras, Penataan Lapangan Umum Penebel, Penataan Tapal Batas Tabanan - Badung Tahap II, Penataan Tapal Batas Tabanan - Jembrana Tahap II, Pembangunan Taman Tugu Singasana Tahap II, Penataan Taman Perjuangan Singasana Tahap II, Pembangunan Skate Park Lapangan Umum Kediri, Pembangunan Senderan Tempat Pembuangan Sampah di Banjar Sarwa Genep, sedangkan Pembangunan SPAM Desa Kesiut, dan Peningkatan SPAM Desa Gadung Sari sudah PHO selesai pekerjaan. (Awil)

Sukses, Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM II) Tim LARAP DAS Cipunagara



Tim LARAP DAS Cipunagara Kementerian PUPR, Ditjen Sumberdaya Air, (BBWS) Citarum saat Pertemuan Konsultasi Masyarakat II (PKM II) di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. (M Tohir)

SUBANG, BN – Kamis 31 Juli 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat II (PKM II) di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.

Kegiatan ini mengkonfirmasi kegiatan pelaksanaan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) dalam program Engineering Service for Cipungara River Basin Management Sub Project di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini tim hanya dalam 6 minggu harus sudah mendatangi lebih 1000 Warga Terdampak Proyek WTP.

Acara ini dihadiri oleh Tim LARAP lengkap, juga jajaran Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, PU kab Subang, PJT, para camat dan kepala desa wilayah proyek, tokoh masyarakat, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.

Tidak dilupakan juga Mr Kim dan jajaran konsultan DMEC Korea. Tujuan utama kegiatan adalah menyampaikan hasil kajian awal, rencana teknis, serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Ketua Tim LARAP, Ari Hariadi, memaparkan rencana



Kepala desa kec, Legon Kulon dengan media bidik Nasional di acara PKM II.

Bupati Asahan Dampingi Plt Dirjen Perkebunan Kementeran RI Tinjau Lokasi Cetak Sawah di Desa Silo Bonto



Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar bersama Plt Dirjen Perkebunan Kementeran RI, Dr. Abdul Roni, saat meninjau lokasi cetak sawah di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. (ist)

ASAHLAN, BN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, M.Si mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementeran RI), Dr. Abdul Roni Angkat saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi cetak sawah di Desa Silo Bonto, Kec Silau

Laut, Kab Asahan Senin (28/07/2025). Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, Dandim 0208/Asahan, perwakilan Danlanal TBA, OPD terkait, Camat Silau Laut, serta Kepala Desa Silau Bonto.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementeran RI, Dr. Abdul Roni Angkat disela-sela peninjauannya menyam-

paikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung program cetak sawah di Kabupaten Asahan. Ia meminta kepada Kepala Desa Silo Bonto dan Camat Silau Laut dan OPD terkait dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada agar proses pengerjaan tidak menimbulkan kendala kedepannya.

“Kita harap cetak sawah ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Permasalahan yang muncul di lapangan harus segera diselesaikan. Kami siap membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dan meminta Forkopimda untuk turut serta mendukung kelancaran program ini,” ungkapnya.

Dikesempatan ini juga, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, M.Si menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Desa Silau Bonto.

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa lahan yang direncanakan akan dicetak menjadi sawah ini seluas 1.200 hektare, yang merupakan milik masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau Kepala Desa untuk membangun komunikasi yang baik dengan warga agar program ini berjalan lancar. (T.P)

Meriah dan Penuh Makna, Puncak HAN OKI 2025



Suasana acara Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). (ist)

OKI, BN – Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) gelar senam bersama anak-anak dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA/SMK se-Kecamatan Kayuagung yang ikut berpartisipasi. Terdapat stand pelayanan publik dari berbagai instansi turut hadir memberikan edukasi dan pelayanan langsung kepada anak-anak serta masyarakat.

“Hari Anak adalah momen yang sangat istimewa, karena kita semua hadir untuk memberikan perhatian dan cinta kepada generasi masa depan bangsa yang sehat, ceria serta berprestasi,” tegas Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki pada gelaran Hari Anak Nasional di Halaman Gedung Kesenian Kayuagung, Selasa (05/08/25).

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan pembagian susu gratis dan nutrisi cegah stunting berupa telur dan beras kepada anak-anak, serta penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA). “Pemerintah turut hadir dalam menuntaskan anak-anak yang beresiko stunting, kami hadir memberikan nutrisi berupa susu, telur serta beras. Dan juga kita bagikan identitas anak berupa Kartu Identitas Anak (KIA) kepada mereka,” ungkapnya.

Ketua TP PKK Kabupaten OKI, Ny. Hj. Ike Meilina Muchendi, yang turut mendampingi kegiatan ini menyampaikan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam

membentuk karakter anak.

“Kami percaya bahwa anak-anak tumbuh hebat dimulai dari rumah yang penuh kasih sayang dan lingkungan yang mendukung. Mari kita ciptakan ruang yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang,” ungkapnya.

Kegiatan juga dilakukan pembagian hadiah untuk para pemenang lomba edukatif dan kreatif anak-anak. Lomba-lomba ini meliputi Lomba Mewarnai untuk tingkat TK, Lomba Melukis (SD), Lomba Baca Puisi (SMP), serta Lomba Fashion dari Limbah Daur Ulang (SMA/SMK).

“Kami sangat bangga dan mengapresiasi anak-anak yang telah berprestasi, yang telah mengikuti lomba kreatif serta edukatif. Kami ucapan selamat dan teruslah berkarya serta belajar,” ungkap Ike.

Kepala Dinas Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten OKI, Hj. Arianti menyampaikan bahwa peringatan HAN ke-41 tahun ini mengusung semangat kolaboratif. “Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa anak adalah subjek yang harus dilibatkan dalam setiap kebijakan dan program. Melalui kegiatan ini, kami dorong anak-anak untuk aktif, sehat, kreatif, dan berdaya,” ungkapnya.

(Nurlis)

Warga Beltim Wajib Kibarkan Merah Putih Satu Bulan Penuh



Bupati Beltim, Kamarudin Muten saat membagikan bendera merah putih ke warga. (diskominfo beltim)

MANGGAR, BN – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur wajibkan seluruh warga untuk memasang atau mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh, terhitung sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus 2025. Pengibaran bendera ini dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI. Hal ini juga menggugah semangat nasionalisme dan gotong royong masyarakat.

Untuk memberikan contoh dan tauladan, Pemkab Beltim melaksanakan Pembagian dan Pemasangan Bendera Merah Putih bersama Bupati dan Forkopimda Beltim di Bundaran Depan Kantor Bupati, Jum’at (1/8/25) Pagi. Bupati Beltim, Kamarudin Muten dan Wakil Bupati Khairil Anwar beserta Forkopimda memasang bendera di bundaran depan Kantor Bupati, yang diikuti pemasangan bendera di seluruh Kantor Pemerintah secara serentak.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Beltim, Evi Nardi mengatakan pengibaran Bendera Merah Putih di Kabupaten Beltim sebagai tindaklanjut dari surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.10.1.1/3823/SJ tanggal 15 Juli 2025. Surat ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

“Pemasangan dan pengibaran bendera ini untuk menggugah rasa cinta tanah air serta meningkatkan semangat nasionalisme dan gotong royong bagi seluruh masyarakat indonesia dalam rangka menyambut HUT ke 80 RI Tahun 2025,” kata Evi.

Dalam surat edarnya tersebut juga ditegaskan bukan hanya kewajiban bagi warga untuk mengibarkan bendera. Kesbangpol Beltim juga wajib membagikan bendera bagi warga yang belum mempunyai bendera.

Tidak tanggung-tanggung Kesbangpol Beltim menyiapkan 10.000 Bendera Merah Putih untuk dibagikan ke setiap kecamatan dan desa. Pembagian ini juga untuk mendukung penerapan Gerakan 10.000.000 Bendera Merah Putih se Indonesia.

“Pembagian ini dilakukan jika ada masyarakat yang tidak ada bendera bisa minta di kecamatan atau setiap desa, karena pemerintah sudah meminta partisipasi bantuan bendera dari pihak swasta,” ungkap Evi. (diskominfo beltim/as)

Bupati Ingatkan Guru Deteksi Dini Antisipasi Bullying



Bupati Beltim, Kamarudin Muten saat mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Beltim. (diskominfo beltim)

MANGGAR, BN – Bupati Belitung Timur (Beltim), Kamarudin Muten kembali mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Beltim. Kali ini, Senin (28/7/25) kunjungannya ke tiga sekolah di Kecamatan Gantung. Kamarudin datang ke SMP Negeri 1, SD Negeri 6 dan SD Negeri 9 Gantung. Tidak sendiri, Bupati datang bersama dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Dedy Wahyudi dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Beltim, Bayu Priyambodo.

Di tiga sekolah ini Kamarudin memberikan arahan kepada guru dan siswa Tak lupa, ia juga membagikan bantuan tas kepada siswa-siswi yang membutuhkan. Saat di SMP Negeri 1 Gantung, Kamarudin meminta para guru memberikan perhatian kepada siswa. Dengan memantau kondisi anak didik serta mau mendengarkan keluhan siswa layaknya anak sendiri.

“Kita minta para guru, baik guru kelas maupun BK untuk lebih peduli dengan anak asuhnya. Anggap siswa itu anak kita sendiri,” kata Kamarudin.

Kamarudin juga menekankan kepada para guru untuk lebih pro aktif mengawasi tingkah laku siswa terutama saat jam sekolah. Dia tidak ingin ada kejadian perundungan (bullying) terjadi di Kabupaten Beltim. “Kita tidak ingin kejadian seperti di Bangka Selatan (kasus bullying) atau yang terjadi di MTS Negeri Manggar terulang kembali. Sekiranya ada anak didik yang mengadu siswa lain membulunya, harus segera ditindak lanjuti,” ungkap Kamarudin.

Selain itu, Bupati menyatakan dalam waktu dekat ini akan segera melantik para kepala sekolah yang berstatus masih pelaksana tugas. Hal ini penting agar kepala sekolah yang sudah berstatus definitif atau tetap dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas. “Kita segera lantiklah agar mereka dapat lebih konsentrasi dan maksimal dalam bekerja. Kita tidak punya beban, namun saya ingatkan ASN jangan main politik,” tegas Kamarudin. (diskominfo beltim/as)

Guru Olahraga Gantung Gelar Festival Satu Bulan



Bupati Beltim Kamarudin Muten saat membuka pertandingan sepakbola di Lapangan Sepak Bola Perol, Gantung, Rabu (30/07/25). (diskominfo beltim)

BABEL, BN – Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) Kecamatan Gantung menggelar Festival Olahraga Anak tahun 2025. Sebanyak ribuan anak-anak dari tingkat SD dan SMP se-Kecamatan Gantung akan ikut dalam festival selama satu bulan lebih ini.

Festival dibuka oleh Bupati Belitung Timur (Beltim), Kamarudin Muten di Lapangan Sepak Bola Perol, Gantung. Pembukaan simbolis ditandai dengan penendangan bola saat Pertandingan Sepak Bola U15 antara SMP Negeri 3 Gantung Vs MTS Muhammadiyah Gantung, Rabu (30/07/25) Pagi.

Kegiatan ini menjadi bagian untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)

Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, serta Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2025. Pelaksanaan dimulai sejak 30 Juli hingga 10 September 2025.

Ketua Panitia Pelaksana, Julian Candra Bayu mengungkapkan Festival Olahraga Anak akan memperlombakan enam cabang olahraga. Mulai dari: Sepak Bola U15, U12, dan U10, Bola Volly Putra SD & SMP, Bola Kasti Putri SD & SMP, Catur SD, Tenis Meja SD & SMP, hingga Atletik Bereg SD.

“Kegiatan ini untuk mempererat persaudaraan dan menanamkan sportivitas sejak dulu. Festival ini bukan sekadar lomba, tetapi juga ajang mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat juang pada generasi muda,” kata Julian.

Guru Olahraga SD Negeri 8 Gantung ini menyatakan festival ini menjadi bukti nyata bahwa olahraga bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang semangat kolaborasi, karakter, dan harapan bagi masa depan generasi muda di Kabupaten Beltim. “Kami bangga melihat antusiasme yang luar biasa dari para peserta, tuturnya,” ujar Julian.

Didampingi Ketua KKGO Kecamatan Gantung Bilma Adhiono, Julian menambahkan olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang membentuk karakter, disiplin, dan rasa tanggung jawab. (diskominfo beltim/as)

Optimalkan Minapolitan dan Raiser Ikan Hias, Bupati Bogor Sinergi dengan KKP RI

BOGOR, BN - Untuk meningkatkan potensi perikanan, Bupati Bogor Rudy Susmanto, melakukan rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dan jajaran, acara rapat berlangsung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis pekan lalu. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan minapolitan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

Kawasan minapolitan Kab Bogor telah ditetapkan sejak tahun 2010 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kini menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan sektor perikanan terpadu yang berbasis wilayah.

Bupati Bogor mengatakan, akan memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha perikanan.

Lanjut Rudy, di Kabupaten Bogor memiliki potensi besar di sektor perikanan. Sehingga ingin memastikan



Bupati Bogor Rudy Susmanto (Peci hitam), Sinergi Dengan KKP RI Sakti Wahyu Trenggono. (eml)

kawasan minapolitan dapat berkembang dengan maksimal dan di dukungan oleh infrastruktur, tata kelola, serta sinergi pusat dan daerah.

"Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI, beserta jajaran atas perhatian dan dukungan nyata bagi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bogor," kata Rudy Susmanto.

Ia juga menjelaskan, kegiatan hari ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Bogor dengan Pemerintah Pusat dalam membangun sektor perikanan yang berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Selain kawasan minapolitan, kegiatan ini juga membahas pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas Raiser Ikan Hias yang berada di kawasan BRIN Cibinong.

Bupati Bogor akan mendorong fasilitas tersebut untuk dikembangkan sebagai pusat inovasi dan ekonomi kreatif berbasis perikanan hias yang dapat mendongkrak nilai tambah serta daya saing komoditas unggulan daerah. (eml)

Diduga Peras Pengusaha Kosmetik Rp 9,4 Juta, Oknum PDAM Bone Terancam Dipecat



kasus dugaan pemerasan kepada pengusaha kosmetik bernama Sri Fardila (27) senilai Rp 9,4 juta. PDAM masih menunggu putusan pengadilan untuk memastikan status kepegawaiananya ke depan.

"Kalau sudah ditetapkan tersangka, maka akan segera dinonaktifkan. Penonaktifan ini berlangsung sampai ada keputusan inkrah dari pengadilan nantinya," ujar Direktur PDAM Wae Manurung Bone Bahtiar Sairing, pekan lalu.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bone AKP Alvin Aji Kurniawan menambahkan, pihaknya sementara merampungkan

berkas dari AR. Dia mengagendakan pemeriksaan AR selaku tersangka pada Minggu (3/8) mendatang. "Berkasnya sementara dirampungkan. Kami juga sudah menyurati dan akan melakukan pemeriksaan pada 3 Agustus," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, oknum pegawai PDAM Wae Manurung Bone berinisial AR ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada pengusaha kosmetik bernama Sri Fardila senilai Rp 9,4 juta. Meski sudah tersangka, AR belum ditahan. "Sudah ditetapkan tersangka. Tapi belum dilakukan penahanan," ujar Kasat Reskrim Polres Bone AKP Alvin Aji Kurniawan, Kamis (31/7). (Edys)

BONE, BN - Direktur PDAM Wae Manurung Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Sairing, S.Sos menonaktifkan status kepegawaian AR alias Appant Chaloko (33) yang ditetapkan tersangka dalam

Satpol PP Lampung Barat Tindak Tegas Prostitusi dan Miras



Petugas Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat saat melaksanakan operasi penertiban terhadap dugaan pelanggaran Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. (Taufik)

LAMPUNG BARAT, BN - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan operasi penertiban terhadap dugaan pelanggaran Perda No 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Kegiatan ini dilakukan pada Minggu malam, 3 Agustus 2025, di sekitar wilayah Jerambah, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Plt. Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat, Domi Nofalisa Utama Faizul, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa operasi ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat mengenai aktivitas yang meresahkan, seperti konsumsi minuman beralkohol, praktik prostitusi, serta kegiatan karaoke liar yang mengganggu ketenangan warga sekitar.

"Laporan masyarakat menunjukkan bahwa lokasi tersebut kerap menjadi tempat berkumpul sekelompok orang yang melakukan aktivitas melanggar norma dan ketertiban. Tidak hanya itu, beberapa kali terjadi keributan hingga perkelahian yang mengancam rasa aman warga sekitar," ujar Domi, Senin 4/8/2025.

Atas dasar tersebut dan atas instruksi langsung dari Bupati Lampung Barat, tim gabungan dikerahkan untuk melakukan penertiban. Terlebih lagi, lokasi yang digunakan merupakan aset milik pemerintah yang tidak semestinya dimanfaatkan untuk kegiatan negatif.

Operasi yang berlangsung secara humanis dan persuasif ini dipimpin oleh Kabid Penegakan Perda dan Perbup, Misranto, S.H., dengan melibatkan 16 personel. Penyisiran dilakukan secara menyeluruh di beberapa titik lokasi yang terindikasi kuat terjadi pelanggaran Perda.

Hasil operasi menunjukkan bahwa di lokasi terdapat sekitar 35 orang pengunjung, baik di dalam maupun luar bangunan. Sebagian di antaranya tertangkap tangan sedang mengkonsumsi minuman keras, bernyanyi karaoke, serta terindikasi melakukan praktik prostitusi.

Dari lokasi, petugas menyita 10 botol minuman beralkohol sebagai barang bukti, dan ditemukan 6 dus minuman beralkohol lainnya. Selain itu, sebanyak 17 wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK)

wilayah, di antaranya Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jabodetabek, Tanggamus, dan Bandar Lampung, menandakan bahwa aktivitas ilegal ini telah melibatkan pihak luar daerah.

Plt. Kasat juga menegaskan bahwa operasi ini bertujuan menciptakan efek jera serta mengembalikan fungsi ruang publik agar tidak disalahgunakan. "Kami berharap operasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat, khususnya di Way Tenong dan secara luas di wilayah Lampung Barat," tutup Domi.

Satpol PP Lampung Barat menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan peraturan daerah secara konsisten, dengan pendekatan yang tegas namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya menegakkan ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. (Taufik)

diamankan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

"Mereka diberikan pengarahan serta peringatan agar meninggalkan aktivitas tersebut. Kami beri waktu 3 hari untuk mengosongkan lokasi, jika masih ditemukan pelanggaran, maka penindakan tegas akan dilanjutkan," tegas Misranto.

Para wanita tersebut berasal dari berbagai

daerah di sekitar wilayah, antaranya Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jabodetabek, Tanggamus, dan Bandar Lampung, menandakan bahwa aktivitas ilegal ini telah melibatkan pihak luar daerah.

Plt. Kasat juga menegaskan bahwa operasi ini bertujuan menciptakan efek jera serta mengembalikan fungsi ruang publik agar tidak disalahgunakan.

"Kami berharap operasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat, khususnya di Way Tenong dan secara luas di wilayah Lampung Barat," tutup Domi.

Satpol PP Lampung Barat menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan peraturan daerah secara konsisten, dengan pendekatan yang tegas namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya menegakkan ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. (Taufik)

dan persaudaraan," ujar Bupati.

Bupati menekankan bahwa turnamen ini menjadi momentum penting untuk mencari bibit atlet lokal berbakat

yang dapat dibina untuk meraih prestasi di level regional, nasional, bahkan internasional. "Pemkab Pesibar

Wakil Bupati Asahan Buka Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik



Wabup Asahan Rianto, saat membuka sosialisasi keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

ASAHLAN, BN - Wakil Bupati Asahan Rianto, SH, M.A.P. Membuka sosialisasi keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (29/07/2025). Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara, Staff Ahli, OPD, Sekretaris OPD, Camat, Kepala Desa serta hadir lainnya.

Laporan panitia dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Juta- wan Sinaga, S.STP., M.A.P menyampaikan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman akan peran dan tanggung jawab PPID dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan Pelaksana, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan informasi yang lebih efektif.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan menyampaikan keterbukaan informasi juga merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan rakyat. Karena itulah setiap badan publik dituntut untuk lebih terbuka dengan pelaksanaan keterbukaan informasi akan berdampak secara internal maupun eksternal.

Pemerintah Kabupaten Asahan telah menerbitkan surat keputusan Bupati Asahan No. 283-Kominfo-Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Lebih lanjut Wabup juga mengatakan sebagai aparat negara dan pengelola badan publik, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyediakan berbagai informasi dari Pemerintah Daerah yang harus kita sebar luaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran yang salah satunya adalah PPID.

Sejalan dengan era globalisasi dan digitalisasi, layanan tentang keterbukaan informasi juga harus mengacu kepada penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk itulah pada hari ini saudara-saudara diminta untuk mengikuti sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Asahan, OPD, Kecamatan, Perangkat Desa, dan para Kepala Sekolah di Kabupaten Asahan.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini resmi saya buka". Tandas Wabup membuka acara.

Di tempat yang sama Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara Dr. Abdul Harris Nasution, S.H., M.Kn, sebagai landasan hukum untuk memperoleh informasi bagi masyarakat, Pemerintah telah melahirkan undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (T.P)

Sambut HUT RI Ke-80, Pemkab Bogor Bagikan Bendera Merah Putih Gratis



Pemkab Bogor Gelar Bagi-Bagi Bendera Merah Putih Serentak. (Emil)

BOGOR, BN - Menindaklanjuti arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih serentak di seluruh Kecamatan dari wilayah timur hingga barat, utara hingga selatan Kabupaten Bogor.

Di wilayah tengah, kegiatan dipusatkan di Lapangan RBC, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, yang dihadiri langsung oleh Camat Cibinong bersama para lurah dari Kelurahan Cibinong, Sukahati, Karadenan, Cirimekar, dan Pabuaran Mekar. Selain pembagian bendera kepada warga, kegiatan juga diiringi dengan aksi pemasangan bendera merah putih di kantor-kantor pemerintahan, termasuk Kantor Kecamatan Cibinong, Kantor Lurah Pondok Rajeg, dan titik-titik strategis di lingkungan sekitar.

Di wilayah barat, seperti Kecamatan Leuwiliang, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ratusan bendera dibagikan kepada pengemudi angkutan umum, pelaku usaha kecil, dan warga yang melintas di pasar tradisional dan simpul-simpul transportasi.

Camat Leuwiliang, WR Pelitawan menyatakan bahwa pihaknya bersama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah membagikan bendera merah putih kepada jajaran RSUD Leuwiliang, kemudian masyarakat, para pengendara angkutan umum, serta dilanjutkan dengan pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul di kantor Kecamatan Leuwiliang. Gerakan ini adalah bentuk konkret menumbuhkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

"Kami ingin semangat kemerdekaan tidak hanya dirasakan di kantor-kantor pemerintahan, tapi juga di jalanan, pasar, dan kendaraan umum. Merah putih harus hadir di seluruh ruang publik selama bulan agustus," ujar Camat Leuwiliang.

Sementara itu di wilayah timur, Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Cariu juga turut serta membagikan bendera kepada komunitas tani dan kelompok masyarakat desa. Di wilayah utara, seperti Babakan Madang, pembagian bendera dilakukan kepada para warga secara gratis, para supir angkot dan lainnya. (eml)

Bupati dan Ketua DPRD Pesisir Barat Berharap Turnamen Sepak Bola Tumbuhkan Jiwa Solidaritas



Bupati dan Ketua DPRD Pesisir Barat bersama para pejabat dan stakeholder olahraga usai pembukaan turnamen sepakbola Bupati cup, Minggu 27/7/2025. (Diskominfosan Pesibar)

dan persaudaraan," ujar Bupati.

Bupati menekankan bahwa turnamen ini menjadi momentum penting untuk mencari bibit atlet lokal berbakat

yang dapat dibina untuk meraih prestasi di level regional, nasional, bahkan internasional. "Pemkab Pesibar

PESISIR BARAT, BN - Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2025 yang digelar di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Minggu, 27 Juli 2025.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Pesibar itu menegaskan bahwa turnamen tahun ini terasa istimewa karena menghadirkan dua kategori kompetisi, yakni kategori umum untuk menjaring talenta muda berbakat, serta kategori U-40 sebagai bentuk penghargaan bagi para senior yang masih aktif di dunia olahraga.

Kedua kategori ini menunjukkan bahwa olahraga adalah milik semua kalangan dan usia. Melalui turnamen ini, kami berharap tidak hanya lahir prestasi, tetapi juga nilai-nilai positif seperti kerja sama, disiplin, solidaritas, dan persaudaraan," ujar Bupati.

Bupati menekankan bahwa turnamen ini menjadi momentum penting untuk mencari bibit atlet lokal berbakat

yang dapat dibina untuk meraih prestasi di level regional, nasional, bahkan internasional. "Pemkab Pesibar

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

Perbup Belum Turun, Retribusi Parkir RSUD Rantau Prapat Belum Bisa Diterapkan

□ Abner Sitanggang 8 Tahun Terapkan Retribusi Parkir "Mencekik Leher"



Abner Sitanggang, ST

LABUHANBATU, BN - Kepala bagian keuangan dan perencanaan Abner Sitanggang ST kembali dikonfirmasi awak media Bidik Nasional (BN) terkait retribusi parkir di RSUD Rantau Prapat, Selasa (29/7/25).

BN menanyakan besarnya setoran dari pihak ketiga CV Padang Pasir Perkasa pemilik Rustam, selaku pengelola parkir di RSUD Rantau Prapat, namun Abner tidak menjawab.

BN kemudian ke Fahmi Kabag Hukum, juga tidak ada. Salah seorang ASN staf bagian hukum mengatakan, Kabag lagi ke Medan, "apa yang bisa di bantu pak?" tanya dia. "Mau tanya dasar hukum retribusi parkir RSUD Rantau Prapat," jawabnya ke BN. "Kalau untuk retribusi parkir RSUD Rantau Prapat Peraturan Bupati (Perbup) belum turun pak dari atas, jadi belum bisa diterapkan retribusi parkir yang baru di RSUD Rantau Prapat pak," jawabnya.

Terpisah DPRD Labuhanbatu yang jabat Ketua DPC Gerindra Kabupaten Labuhanbatu H. Abdul Karim Hasibuan, SH, MH saat dimintai keterangan terkait Perbup tahun 2025 soal retribusi parkir RSUD Rantau Prapat mengatakan, "Kalau Perbup belum di teken oleh Bupati tahun 2025, berarti tarif parkir di RSUD masih tarif yang lama, untuk kendaraan roda dua Rp. 1.000 dan roda empat Rp. 2.000," ucapnya.

Untuk diketahui Abner Sitanggang ST lebih 8 tahun memiliki jabatan strategis di RSUD terapkan retribusi parkir di RSUD Rantau Prapat yang membuat kekisruhan dan keresahan masyarakat terapkan parker cukup tinggi "mencekik leher", sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) untuk roda empat dan roda dua Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Jalin Silaturahmi, Kalapas Rantauprapat Gelar Laga Trofeo Cup Bersama Insan Pers dan Masyarakat



LABUHANBATU, BN - Menyambut HUT Kemerdekaan ke-80 RI, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Rantauprapat menggelar pertandingan sepak bola exhibition, bertajuk Trofeo Cup bersama rekan-rekan wartawan dalam wadah Jurnalis Football Club (FC) serta diikuti tim Fun Football mewakili masyarakat sekitar.

Kegiatan Trofeo Cup yang diikuti oleh 3 tiga tim ini di gelar di Stadion Binara Rantauprapat, pada Minggu pagi, (03/08/2025) sekitar pukul 08.00 Wib.

Adapun hasil jalannya pertandingan sepak bola Trofeo Cup ini Jurnalis FC meraih kemenangan dengan skor 2-1 kontra PS. Lapas Rantauprapat.

Kemudian Run Football bermain seri 1-1 bersua PS. Lapas. Selanjutnya pada pertandingan puncak Run Football bermain imbang 0-0 versus Jurnalis FC.

Atas hasil tersebut Jurnalis FC menasihahkan dirinya menjadi juara dengan memiliki poin lebih tinggi dari kedua Tim tersebut. Jurnalis FC (Point 4), Run Football

Polda Jatim Bongkar ...

Larangan Sidoarjo, pada 25 Juli 2025 guna antisipasi peredaran beras oplosan di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Tim mendapatkan sample beberapa produk dan merk beras premium dan salah satunya dengan merk SPG. Selanjutnya dilakukan cek mandiri di kantor Bulog Surabaya diperoleh hasil, bahwa kualitas beras yang dijual tersebut diduga tidak sesuai dengan mutu standar atau kualitas premium.

Dari hasil kegiatan tersebut kemudian pada 29 Juli 2025 Tim Satgas Pangan Satreskrim Polresta Sidoarjo mendatangi tempat produksi beras premium oleh CV. Sumber Pangan Grup dengan merk SPG di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo milik Sdr. MLH.

Hasil penyelidikan di lokasi tempat produksi beras merk SPG, disampaikan Kapolda Jatim Irjen. Pol. Nanang Avianto, dalam konferensi pers, Senin (4/8/2025), bahwa pemilik usaha tidak dapat menunjukkan bukti uji lab terhadap beras premium hasil produksi di

perusahaannya tersebut, Pemilik CV SPG tidak mempunyai kompetensi atau pengetahuan dalam hal produksi beras premium, terhadap mesin operasional tidak pernah dilakukan uji layak produksi dari pihak yang berwenang serta pada kemasan beras premium dengan merk SPG tercantum tanda SNI dan logo Halal yang pada faktanya belum mempunyai sertifikat tersebut.

"Atas dasar tersebut MLH beserta barang bukti diamankan ke Polresta Sidoarjo untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga melibatkan saksi ahli dari Badan Standarisasi Nasional, ahli dari perlindungan konsumen Disperindag Jatim dan uji laboratorium terkait standarisasi mutu beras premium dengan pengambilan sampel beras SPG," ujar Kapolda Jatim Irjen. Pol. Nanang Avianto.

Lebih lanjut Irjen. Pol. Nanang Avianto memaparkan hasil beras oplos merk SPG, bahwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil komposisi beras tidak sesuai dengan standar mutu beras premium hasil produksi di

Diberitakan BN sebelumnya, retribusi parkir di RSUD Rantau Prapat dikeluhkan pihak pasien dan pengelolaan parkir RSUD di pihak ketiga, awak media BN mencoba menggali informasi tersebut dengan menemui Kabag Sekretariat di RSUD dr. NA, Senin 28/7/2025.

Disinggung soal retribusi parkir yang dikeluhkan keluarga Pasien, dr. NA mengatakan, "Ini bukan bagian saya, coba jumpai bagian SDM pak PS di ruangan nya," ucapnya.

Dikonfirmasi via seluler, bagian SDM melalui PS (inisial nama) mengatakan, "Jumpa Kita di ruangan ketua di lantai empat ruangan SDM RSUD Rantau Prapat," jelasnya.

Saat dijumpai di ruang kerjanya digali keterangan ke PS terkait pengelolaan parkir dipihak ketiga oleh RSUD Rantau Prapat, PS mengatakan, "Pengelolaan CV Padang Pasir Perkasa," jawab PS. "Karena bagian saya untuk teken kontrak antara pihak ketiga ke RSUD bang, lanjut untuk yang menekek kerja sama antara pihak RSUD dan pihak ketiga bang, diteken Direktur RSUD langsung," tegasnya.

Disoal berapa tahun kontrak kerjasama antara pihak RSUD dan pihak ketiga, PS mengatakan satu tahun, dan disoal berapa pendapatan untuk 1 tahun hasil retribusi parkir yang disetor pihak ketiga ke pihak RSUD ditambahkan PS, "Langsung saja konfirmasi ke Kabag Keuangan bang, karena setoran retribusi parkir oleh pihak ketiga ke Kabag keuangan," ujarnya.

Di ruangan terpisah, selanjutnya BN menghubungi Kabag Keuangan RSUD Abner Sitanggang melalui via seluler WhatsApp namun panggilan awak media tidak dijawab. (M.Sukma)

(Point 2), PS. Lapas Rantauprapat (Point 1).

Diseleksi akhir pertandingan, Kalapas Kelas IIA Rantauprapat Khairul Bahri Siregar, Amd., IP., S.H., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang Silaturahmi dengan rekan-rekan pers dan masyarakat di Lingkungan sekitar.

"Kegiatan kita pagi ini dengan teman-teman pers, kemudian ada juga dari masyarakat melakukan pertandingan sepak bola untuk menyambut HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia Tahun 2025, kita sebut dengan kegiatan Trofeo Cup," ujar Kalapas.

Lebih lanjut, kalapas menuturkan, mudah-mudahan tujuan kegiatan ini ingin menjalin silaturahmi, kebersamaan, baik dengan teman-teman pers dan masyarakat dari lingkungan sekitar.

Sementara itu perwakilan dari Jurnalis M. Sukma mengucapkan, terima kasih kepada Kalapas atas ide kegiatan yang sangat cemerlang ini.

"Artinya selain dari sisi jurnalis, rekan-rekan wartawan ada juga basic olahraganya sehingga dengan digelarnya Trofeo ini, rekan-rekan Jurnalis nanti akan aktif kedeppannya," ujar M. Sukma.

Masih kata M. Sukma, harapannya kepada Kalapas kegiatan ini berkesinambungan, diagendakan nantinya ada uji coba yang akan dilakukan selain Trofeo Cup ini.

"Terkait dengan program Bapak Kalapas di Kabupaten Labuhanbatu, baik olahraga maupun program kinerja lainnya, kami rekan-rekan Jurnalis siap mendukung," tutup M. Sukma. (Red)

Sambungan hal 1

DPC KAI Magetan Somasi KCP Nasari Madiun Pertanyakan Transparansi Asuransi Kredit Pensiu



Gunadi, S.H. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Magetan. (Ashar)

MAGETAN, BN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Magetan melayangkan somasi resmi kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Nasari Madiun tertanggal 4 Agustus 2025 itu dengan tuntutan keterbukaan pihak koperasi terkait dokumen perjanjian asuransi atas nama Rachmad Sujitno seorang pensiunan asal Kecamatan Ngariboyo, Magetan.

Rachmad Sujitno telah memberikan kuasa hukumnya kepada Gunadi, S.H. dan Evita Anggrayny Dian Savitri, S.H., tertanggal 25 Juli 2025, akhirnya memberikan somasi terbuka, menuntut pihak Nasari

menyerahkan salinan polis atau sertifikat kepesertaan asuransi jiwa yang premi sebesar Rp16.318.000,- telah dibebankan kepada klien mereka saat pencairan kredit pada 22 September 2020.

"Premi tersebut jelas tercantum dalam rincian pencairan kredit. Klien kami memiliki hak mutlak untuk mengetahui dan mendapatkan salinan dokumen asuransi karena sebagai pihak tertanggung sekaligus pembayar premi," ucap Gunadi, S.H.

"Kuasa hukum menilai penolakan pihak KCP Nasari Kota Madiun untuk memberikan salinan dokumen asuransi adalah tidak berdasar dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, sebagai hal tersebut termaktub dalam isi surat Somasi," ungkap Gunadi.

Lanjutnya pula, pihak kuasa hukum menuduh dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan administrasi di tubuh koperasi Nasari. Dugaan ini didasarkan pada tidak terdebetnya dana pensiun klien mereka selama hampir tiga tahun, tanpa penjelasan yang jelas.

"Indikasi kuat adanya mal-administrasi, bahkan potensi penyalahgunaan dana asuransi oleh pihak internal koperasi meskipun tidak terlihatnya ada kerugian finansial langsung ke Klien kami," kata Evita Anggrayny Dian Savitri, S.H.

Narasi dari Somasi ke KCP Nasari Kota Madiun tidak lupa mencantumkan dasar-dasar hukum yang mendasari tuntutan informasi ini, di antaranya:

Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak atas informasi yang benar dan jujur.

Pasal 26 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, yang mewajibkan perusahaan asuransi memberikan polis kepada pemegangnya.

Pasal 1338 dan Pasal 1365 KUHP/Perdata tentang kewajiban beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan larangan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan lembaga pengelola dana publik untuk transparan.

Kuasa hukum menegaskan bahwa KCP Nasari Madiun bekerja sama dengan BTPN dalam penyaluran kredit pensiun, yang menambah bobot urgensi tuntutan keterbukaan ini. Surat somasi yang telah disampaikan oleh DPC KAI Magetan memberi tempo waktu 3 (tiga) hari kerja sejak surat diterima oleh pihak koperasi. Jika dalam waktu tersebut permintaan tidak diindahkan, maka dari pihak kuasa hukum menyatakan akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, termasuk gugatan ke Pengadilan Negeri dan laporan kepada aparat penegak hukum.

"Transparansi dalam praktik lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, terutama pensiunan sangat perlu dipegangkhan," tegas Gunadi. (Ashar)

Serahkan 23 SK ...

berpesan, nantinya selama bertugas, diharapkan agar selalu senantiasa menge-depankan bekerja dengan tulus dan ikhlas.

Layani masyarakat dengan penuh pengabdian, begitu juga dengan tenaga guru, didikdilah para generasi bangsa ini dengan penuh kasih

sayang. Kelak mereka lah yang akan jadi penerus dikemudian hari.

"Bekerjalah dengan tulus dan ikhlas serta bekerja samalah sebagai tim dalam tempat kerja kalian, fokuslah dalam bekerja," tambah H. Zukri

Disisi lain salah satu dari

Sambungan hal 7

23 CPNS terpilih Melva Ronasari putri batak boru sinaga saat di temui awak media,

mengucapkan terimah kasih saat menerima SK, "Semoga amanah dan dapat mengembangkan tugas yang di percayakan kelak kepada saya," ucapnya.

(js)

Bupati dan Ketua ...

berkomitmen mendukung kegiatan olahraga sebagai bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat jasmani dan rohani," tambahnya.

Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar ber-standing dengan menjunjung

tinggi sportivitas, menghormati lawan, serta menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung. Pembukaan turnamen bergengsi tingkat kabupaten ini turut dihadiri Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., M.Kn., Ketua DPRD Mohammad

Emir Lil Ardi, S.H., Wakil Ketua II DPRD M. Amin Basri, Pj. Sekda Tedi Zad-miko, S.KM., S.H., M.M., Ketua PSSI Pesibar Aris Ikh-wanda, jajaran kepala OPD, tim peserta, serta ribuan masyarakat yang memadati arena pertandingan. (Taufik)

Sambungan hal 9

Gubernur Khofifah ...

mengungkapkan kebanggaannya atas capaian Jawa Timur sebagai Juara Umum Lomba Kompetensi Siswa Nasional (LKS Dikmen) ke-33 Tahun 2025, yang sekaligus mencetak hattrick kemenangan tiga tahun berturut-turut.

"Saya ingin sampaikan, jangan pernah underestimate sesuatu. Sukses di persiapan penting, sukses di pelaksanaan penting, dan sukses di prestasi juga penting. Insya Allah, dunia pendidikan kita akan terus kita jaga dan kita gerakkan untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara," kata Gubernur Khofifah.

tinggi sportivitas, menghormati lawan, serta menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung. Pembukaan turnamen bergengsi tingkat kabupaten ini turut dihadiri Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., M.Kn., Ketua DPRD Mohammad

Selain itu, Khofifah menyambut hangat kedatangan bukan hanya peserta namun juga Para Rektor Perguruan Tinggi PGRI di Bumi Majapahit, yang dikenal sebagai pusat nilai-nilai kebangsaan dan semangat kenusantaraan. "Selamat datang di Madiun, selamat datang di Jawa Timur, selamat datang di Bumi Majapahit. Selamat datang di bumi yang mengajarkan kenusantaraan dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka yang meminum air Majapahit, Insya Allah cintanya ke Indonesia adalah cinta lahir batin," ucapnya.

(dji)

Peringatan Hari Bhakti ...

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. TNI AU tidak hanya hadir dalam menjaga kedaulatan udara, tetapi juga turun langsung membantu masyarakat. ini adalah bentuk pengabdian kita," ujar Ketua Fraksi PKB.

Dalam acara tersebut, diselenggarakan berbagai layanan sosial seperti pengobatan gratis, donor darah, pembagian sembako, serta pelayanan kesehatan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat.

go dan sekitarnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Komandan Lanud Abdulrahman Saleh, Wakapolres Malang, dan tokoh penting lainnya. DPRD Kabupaten Malang menilai bahwa kegiatan ini sejalan dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup dan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan sosial.

Abdulloh Satar sekaligus selaku sekretaris komisi III DPRD, "Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan di wilayah lain di Kabupaten Malang. Semangat gotong royong dan kebersamaan ini harus terus dijaga," ucapnya.

Sambungan hal 12

Dengan terselenggaranya acara ini, DPRD Kabupaten Malang juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan aktif, dan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program yang bersifat kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. (Adv/Nn)

Korupsi MInyak

Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Seluruhnya ditempel stiker bertuliskan 'Disegel Oleh Penyidik Jampidsus'.

Lima unit kendaraan yang disita terdiri dari tiga mobil sedan Mercy berkilir hitam, mobil Toyota Alphard hitam, hingga sebuah MINI Cooper berkilir putih. Dari lima mobil yang disita itu tak satupun yang memiliki pelat nomor. Kepala penkum Kejagung, Anang Supriatna menyatakan lima mobil itu memang disita dalam kondisi tanpa pelat nomor.

"Penyidik temukan memang kondisinya begini, tidak ada pelat nomornya, sengaja untuk menghilangkan," kata Anang kepada wartawan.

Anang mengatakan lima mobil itu disita dari pihak yang

Proyek BKK...

sama dengan perangkat desa, namun akhirnya Kades bertindak sendiri dan tidak melibatkan bendahara desa dan perangkat desa. Kemudian anggaran tersebut dari desa dibawa oleh Kades Sura'i ke pihak ketiga disuatu tempat. "Saat pertemuan diduga ada Timlak (tim pelaksana) dan ada anggota DPRD Provinsi yang memberikan proyek tersebut untuk bagi-bagi persentase/komisi," ujar sumber itu.

Staf DPRD Partai PKS Provinsi Jawa Timur, Aringga dikonfirmasi BN di rumahnya Senin (04/08/25) jam 15.48 mengatakan, "Untuk proyek desa Dorogowok tersebut murni tidak ada campur tangan saya, bukan seperti di Desa Jokarto dan di Desa Pulo Kec. Tempeh, kalau ini Kades Sura'i setelah serap aspirasi masyarakat (reses) memberikan proposal ke saya buat sendiri terus saya ajukan ke provinsi. Setelah cair saya tanya mulai dari gambar dan RAB (rencana anggaran belanja) sudah ada orangnya yang bisa membantu dan membuatkan, yang jelas semua ini tanggungjawab Kades Sura'i sendiri," tandas Aringga.

Aringga mengatakan, "Saya di whatsapp dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah) provinsi Jatim terkait SPJ Desa Dorogowok, hanya sebatas itu saja, karena setahu mereka yang di provinsi itu ada saya. Kemudian saya tanyakan kepada Kades Sura'i, bahkan rekening koran setelah saya cek pengambilan dananya juga bertahap sesuai kebutuhan," jelasnya Aringga.

Aringga mengatakan, anehnya kenapa anggaran sudah masuk rekening desa oleh Kades Sura'i dipindahkan ke rekening pribadi. Terbukti sudah saya cek di rekening koran yang ditunjukkan Kades Sura'i memang masuk rekening koran Kades Sura'I," terangnya.

Ketua umum Perkumpulan Paralegal Republik Indonesia (Perpari) angkat bicara, mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian dan Kejaksaan Lumajang mengusut dugaan korupsi ini. "Dugaan korupsinya jelas ada fisik proyek, ada transper dan rekening Koran, ada saksi bendahara dan perangkat desa yang diminta keterangan. Ini bisa sebagai pelajaran agar tidak seenaknya pejabat Negara korupsi uang Negara," tandas Ketua Umum Perpari

Seperi diberitakan BN edisi 873/20-30 Juni 2025, Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur berupa Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) dari salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dengan nilai sangat fantastis Rp 1.475.000.000,- (1.475 Miliar), berupa bangunan drainase 3 Dusun di Lokasi yang berbeda : Dusun Panggung Gempol, Dusun Wringin Sari, Dusun Karangrejo.

Usut Alih Fungsi ...

Kabupaten Lumajang. "Dokumen-dokumen ini akan menjadi bukti penting dalam proses penyidikan kasus korupsi ini," kata Kosasih.

Dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi lahan Sungai Asem yang menca-

pai 9.600 meter persegi dan kini menjadi perumahan. Sungai Asem merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak boleh digunakan tanpa izin resmi. "Sungai Asem seharusnya memiliki fungsi utama sebagai saluran air

atau aliran sungai, namun kini telah berubah menjadi perumahan," jelas Kosasih.

Kejaksaan Negeri Lumajang telah memeriksa 22 saksi dan akan berkoordinasi dengan ahli untuk menentukan kerugian negara. Jika kerugian negara

telah ditentukan, maka akan ditetapkan tersangka dalam kasus ini. "Kami akan terus melakukan penyidikan secara transparan dan profesional untuk menungkap kasus korupsi ini," kata Kosasih.

(son)

Oknum Polsek ...

anggota Polsek Bulu.

Sementara itu, sopir truk bebas laluasa melaju kencang dengan kecepatan tinggi alias kabur, pada akhirnya sopir dan truk pengangsu hilang tidak ditemukan lagi kemudian 2 oknum anggota Polsek diduga pura-pura mengejar tapi hasilnya nihil.

Sejumlah awak media kemudian mendatangi Polsek Bulu. Saat dikonfirmasi Kanit Reskrim Polsek Bulu menyampaikan permohonan maaf kepada awak me-

dia atas kinerja 2 anggotanya sehingga Truk ngangsu solar subsidi lepas kabur dan tidak ditemukan.

Seharusnya 2 oknum anggota Polsek Bulu langsung menangkap mafia solar, sopir dan truknya, kemudian diamankan ke Polsek untuk diproses hukum lanjut. Diduga kuat kinerja 2 oknum anggota Polsek Bulu Polres Temanggung bekerja tidak sesuai SOP.

Perlu dicatat, penyalahgunaan BBM bersubsidi

merupakan tindak pidana serius. Pelaku penimbunan atau pengoplosan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.

Awak media mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kapolres Kabupaten Temanggung segera mengambil tindakan tegas karena di wilayah

hukumnya marak truk truk 'penggarong' BBM subsidi di SPBU SPBU nakal.

Kami dari rekan media juga meminta atensi khusus kepada Paminal Polda Jateng segera melakukan penyelidikan di Polsek Bulu Kabupaten Temanggung, tindak tegas 2 oknum anggota yang bekerja tidak sesuai SOP, karena diduga kuat sengaja melakukan pembiaran melepaskan sopir dan truk pengangsu solar subsidi kabur. (Tim)

Eksekusi Putusan MA ...

Slamet Setiawan, terpidana kasus tindak pidana korupsi PDAM Delta Tirta. Hal itu, diungkapkan setelah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung.

Slamet dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Putusan kasasi bernomor 3014 K/Pid.Sus/2025 tersebut diputuskan, pada, (15/5/2025), oleh majelis hakim agung yang diketuai Dwiwarsso Budi Santitarto.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun kepada Slamet Setiawan serta denda sebesar Rp300 juta subsidi tiga bulan kurungan. Selain pidana pokok, majelis hakim juga menutupkan pidana tambahan berupa uang pengembalian (UP) kerugian negara sebesar Rp 3,9 miliar. Apabila tidak dibayar, terpidana akan menjalani tambahan hukuman tiga tahun penjara.

Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo, Hadi Sutipto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima salinan putusan tersebut dan menyatakan Kejari siap melaksanakan eksekusi penahanan terhadap Slamet Setiawan. "Salinan putusan kasasi sudah kami terima, pastinya akan dilakukan eksekusi penahanan," tegas Hadi saat dikonfirmasi, Senin, (28/7/2025).

Sambungan hal 1

terafiliasi dengan Riza Chalid. Kelima mobil itu disita penyidik dari hasil penggeledahan di daerah Jakarta Selatan. "Dari penggeledahan ini, kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan keperilikan atas nama tersangka MRC," ujar Anang.

Riza Chalid menjadi salah satu nama teranyar yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Setelah ditetapkan tersangka, Riza tercatat tiga kali mangkir panggilan Kejagung.

Anang mengatakan dalam panggilan pemeriksaan tersangka yang ketiga pada Senin (4/8), Riza kembali absen tanpa memberikan konfirmasi. Kejagung ini tengah bersiap mengajukan red notice untuk Riza Chalid. (sumber detik.com/)

Sambungan hal 1

Novi sebagai bendahara desa Dorogowok didampingi Herman Kaur Perencanaan, pada saat dikonfirmasi Bidik Nasional (BN) Selasa (25/03/2025) jam 12.06 WIB di Balai Desa Dorogowok menyampaikan secara detail penempatan lokasi proyek, transferan masuk senilai Rp. 1.475 Miliar, sampai uang tersebut diambil semua oleh Kades Sura'i. "Tapi uang itu dibawa kemana dan acara apa dengan siapa, saya tidak tahu," kata Novi jujur.

Menurut sumber BN anggaran tersebut terserap di Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang diterima Kades Dorogowok Sura'i beserta bendahara desa Novi, namun anggaran tersebut oleh Kades Sura'i dibawa kemana dan tidak ada yang tahu. Diduga uang diserahkan kepada pihak ketiga dan mereka diduga dapat fee. "Sebetulnya saya tahu nilai jumlah rupiahnya yang diterima, tetapi saya tidak berani menyebutkan karena khawatir Pak Kades Sura'i tidak mengaku/mengelak," tandasnya.

Menurut sumber itu, untuk pelaksanaan proyek harus ada SK dari desa dan juga ada pemberdayaan warga dilibatkan untuk bekerja dalam proyek tersebut, apakah betul-betul dilaksanakan?

Sementara Advokat yang berdomisili di Lumajang, Heru Laksono,SH., mantan anggota DPRD Kab. Lumajang, menyoroti kasus ini kuat dugaan ada permainan proyek/bancakan proyek BKK Provinsi Jawa Timur dengan nilai sangat fantastis Rp. 1.475 Miliar tersebut. "Apalagi proyek tersebut BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, dan dikerjakan tahun 2025 sampai sekarang belum selesai, seharusnya bila pencarian dana sudah terlalu melewat akhir tahun 2024 dan bila dikerjakan saat itu tidak sampai dengan batas waktunya, sebenarnya biar dana tersebut masuk dana Silpa dan Tahun berikutnya masih bisa diharap untuk dimohon kembali," ujarnya.

Dikatakan Heru temuan ini harus segera ditindak lanjuti jika ada dugaan indikasi penyimpangan, maka pihak berwenang/APH harus mengambil langkah hukum, masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran BKK Provinsi Jawa Timur mereka kelola. Untuk proyek tersebut harus diawasi terus menerus secara ketat untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standart yang ditetapkan, "Dugaan permainan dalam proyek BKK Provinsi Jawa Timur DPRD ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut, langkah tegas diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat dari pihak wewenang/APH memastikan tidak ada dugaan penyalahgunaan anggaran proyek tersebut," tegas Advokat Lumajang ini. (Son/bersambung edisi berikutnya)

Sambungan hal 1

atau aliran sungai, namun kini telah berubah menjadi perumahan," jelas Kosasih.

Kejaksaan Negeri Lumajang telah memeriksa 22 saksi dan akan berkoordinasi dengan ahli untuk menentukan kerugian negara. Jika kerugian negara

(son)

Sambungan hal 1

telah ditentukan, maka akan ditetapkan tersangka dalam kasus ini. "Kami akan terus melakukan penyidikan secara transparan dan profesional untuk menungkap kasus korupsi ini," kata Kosasih.

(son)

Sambungan hal 1

atau aliran sungai, namun kini telah berubah menjadi perumahan," jelas Kosasih.

Kejaksaan Negeri Lumajang telah memeriksa 22 saksi dan akan berkoordinasi dengan ahli untuk menentukan kerugian negara. Jika kerugian negara

(son)

Sambungan hal 1

atau aliran sungai, namun kini telah berubah menjadi perumahan," jelas Kosasih.

Kejaksaan Negeri Lumajang telah memeriksa 22 saksi dan akan berkoordinasi dengan ahli untuk menentukan kerugian negara. Jika kerugian negara

(son)

Sambungan hal 1

atau aliran sungai, namun kini telah berubah menjadi perumahan," jelas Kosasih.

Kejaksaan Negeri Lumajang telah memeriksa 22 saksi dan akan berkoordinasi dengan ahli untuk menentukan kerugian negara. Jika kerugian negara

(son)

Tersangka, Eks ...

wewenang pengelolaan aset

daerah di Rusunawa Tambak Sawah. Ia ditetapkan bersama tiga tersangka lainnya, yakni SL, DP, dan ABT, pada (22/7/2025).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi mengatakan, meskipun Heri telah keluar dari rumah sakit, penahanan belum dilakukan lantaran kondisi kesehatan Heri belum membaik. "Yang bersangkutan masih rawat jalan. Kami akan cek dulu kesehatan-nya," ujar Franky, pada,

Senin (4/8/2025).

Franky menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan jadwal penahanan terhadap Heri. Namun, pemanggilan akan dilakukan untuk proses pemeriksaan jika kondisinya telah membaik. "Kalu memang sudah sehat, kami panggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan," tegasnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan Mendagri Nomor 152 Tahun 2004 dan Permenagri No 19 Tahun 2016 tentang kesehatan dan kesejahteraan.

Sambungan hal 1 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Keempat tersangka diduga tidak menjalankan fungsinya sebagai pengguna barang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, negara diperkirakan merugi hingga Rp 9,75 miliar dalam kurun waktu 2008 sampai 2014.

Saat ini, penyidik Kejari Sidoarjo masih mendalami keterlibatan masing-masing tersangka, sembari menunggu proses pemeriksaan lanjut terhadap Heri Soesanto. (Teddy Syah)

Warga Pertanyakan ...

garapan proyek jalan hotmix tersebut sangat kasar, kemarin sudah makan korban anak kecil, ada anak kecil jatuh sampai berdarah," ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan Kepala Desa. Kwaron belum berhasil ditemui BN. Awak media mencoba mencari Kades di balai desa tapi juga tidak ada di tempat.

Sementara itu warga Desa Kwaron juga berharap kepada kepala desa agar terbuka terkait pembangunan di desa kwaron. "Jangan slintutan dengan warga, bila dikerjakan oleh pihak ketiga juga sampai kan kepada warga, jangan asal-asalan," ujar warga setempat. "Selain itu, kami sebagai warga berhak mengetahui pada pembangunan itu, darimana anggaran yang dikurangkan dan berapa nilai nya, bahkan penggunaan anggaran harus ada kejelasan, karena menyengat mutu dan kualitas pada bangunan," ujar warga.

Perlu diketahui, Dasar Hukum dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 mengatur barang atau jasa pemerintah, yang mencakup kewajiban memasang papan nama proyek. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) UU nomor 12 tahun 2014 dan nomor 29 tahun 2006 mengatur tentang kewajiban memasang papan nama proyek pada bangunan fisik yang di biaya oleh negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 39 mengatur bahwa kepada desa wajib menyampaikan informasi mengenai APB desa kepada masyarakat melalui media informasi termasuk papan informasi desa. UU tersebut sangat jelas tentang betapa pentingnya pemasangan papan nama proyek dan informasi kepada publik dan masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan dan dugaan yang di dasari pelanggaran transparansi oleh pihak pengelola proyek desa.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat setempat ketika di temui BN, menyampaikan, "Inilah akibat proyek di tangani oleh pihak ketiga, bukan di kerjakan oleh warga desa kwaron sendiri. Bukan warga yang di untungkan, tetapi kepala desa yang Untung. Siapa yang membawa rekanan yang memperkerjakan nya, kalau bukan kepala desa, ya beginilah jadinya, karena warga dianggap nggak tahu apa-apa, tetapi ternyata yang tidak berasa ya kepala desa kwaron, karena menunjuk tekanan yang kurang di jamin tanggung jawabnya," ungkapnya.

Selain itu, ada warga lain juga ikut bicara dan berpendapat, "Ini bukan sekedar masalah kualitas jalan, namun juga penggelapan uang rakyat, anggaran yang di gelontoran berasal dari pajak rakyat, makanya warga setempat merasa kecewa." ujarnya lagi. (Tok)

Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Prioritas

■ Membangun Bersama, DPRD dan Pemkab Pasuruan Sahkan Raperda P-APBD 2025



SENERGI KOLABORASI: Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo (Kiri) bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan menunjukkan Nota Kesepakatan Raperda P-APBD 2025



KOMITMEN BERSAMA: Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menandatangani Nota Persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



KOMITMEN BERSAMA: Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo menandatangani Nota Persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



PASURUAN, BN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara resmi menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.

Kesepakatan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar, Senin (28/7/2025) di ruang Rapat

Utama DPRD Kabupaten Pasuruan dengan ditandai penandatanganan Nota Persetujuan bersama Raperda P-APBD tahun 2025. Persetujuan merupakan hasil dari proses pembahasan

yang intensif dan mendalam antara eksekutif dan legislatif sejak awal Juli 2025, silam.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dalam pidato - penutupnya

tegas menyampaikan jika pembahasan Raperda perubahan APBD dilakukan secara intensif selektif dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari fraksi dan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

"Seluruh masukan telah dikaji bersama untuk menyempurnakan Raperda kali ini. Melalui persetujuan ini, kami berharap pemerintah

daerah dapat lebih optimal dalam melaksanakan program prioritas pembangunan daerah, infrastruktur dan Pendidikan," katanya.

Lebih lanjut politisi senior partai besutan Muhammin Iskandar itu menambahkan, pelaksanaan APBD hasil perubahan ini harus terus diawasi dan dievaluasi agar sejalan dengan tujuannya menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Mudah-mudahan, melalui APBD ini, kita semakin dekat pada cita-cita menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah yang maju,

sejahtera, dan berkeadilan," tutupnya optimis.

Terpisah, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menekankan, dokumen Perubahan APBD bukanlah sekedar administrasi keuangan, melainkan instrumen paling penting untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

"Perubahan APBD 2025 mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan prioritas pembangunan sesuai dinamika sosial, dan kebutuhan masyarakat, serta realisasi belanja yang berjalan pada

satu tahun anggaran,"

Mas Rusdi sapaan akrab Bupati Pasuruan itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pimpinan, anggota DPRD yang telah memberikan ruang dialog dan diskusi yang produktif sepanjang proses pembahasan berlangsung.

Lebih lanjut dikatakan, kesepakatan ini bukti nyata kuatnya semangat kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

"Persetujuan ini juga menjadi indikator akuntabilitas dan komitmen kita

dalam meperbaiki efektivitas program kegiatan pembangunan. Setiap angka dalam APBD memiliki implikasi secara langsung pada pelayanan publik, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat," urainya.

Dalam Raperda Perubahan APBD 2025, pemerintah Kabupaten Pasuruan bakal mepercepat program-program prioritas, peningkatan infrastruktur dasar, hingga pelayanan pendidikan, kesehatan, serta dukungan bagi sektor usaha kecil dan menengah menjadi komsent.

(*)

Gubernur Khofifah Komitmen Wujudkan SDM Unggul di Jatim Jemput Indonesia Emas



Gubernur Khofifah foto bersama dengan para peserta. (ist)

MADIUN, BN - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pihaknya berkomitmen dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Jawa Timur dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan di hadapan Rektor Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Indonesia saat Gala Dinner Welcoming Ceremony Pekan Olahra-

ga dan Seni Nasional Mahasiswa (PORSENASMA) V Perguruan Tinggi PGRI Tahun 2025, yang digelar di Bakorwil Madiun, Senin (4/8).

"Kami sangat serius menyambut Indonesia Emas. APBD Jawa Timur dialokasikan cukup besar untuk sektor pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa kualitas SDM Jawa Timur menjadi penopang kekuatan bangsa di masa depan," ujarnya.

Menurutnya, pendidikan yang unggul bukan hanya soal keilmuan, tetapi juga pendidikan karakter. Oleh karena itu, Pemprov Jatim sangat menghargai peran guru dan terus memperkuat pendidikan yang berimbang antara kecerdasan intelektual dan integritas moral.

"Jadi yang harus diajarkan tidak hanya keilmuan tapi juga karakter. Pintar juga harus diikuti dengan sesuatu yang benar. Pintar dan benar harus berasiring. Inilah yang menjadi pondasi utama dalam mencetak generasi emas Indonesia," katanya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya untuk selalu menghormati dan menghargai jasa guru.

"PGRI ini akan menjadi referensi besar bagi kita semua untuk bisa menghargai jasa para guru. Sahabat-sahabat semua juga masuk pada profesi masing-masing karena dididik, dibina, dibimbing, dibesarkan oleh para guru. Maka, yang belum sempat memberi penghormatan bagi guru,

mula hormatilah," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengutip kisah inspiratif dari Kaisar Jepang pasca-Perang Dunia II untuk menelekkan peran strategis guru dalam membangun peradaban bangsa. "Saat Nagasaki dan Hiroshima dibom, Kaisar Hirohito bertanya berapa jumlah guru yang tersisa. Nagasaki dan Hiroshima tidak hanya rata, tapi mereka punya masalah serius. Dia ingin membangun kembali peradaban Jepang, maka yang dicari guru. Karena yang membesarkan kita, membesarkan bangsa, membesarkan dunia, adalah guru. Insya Allah menjadi guru adalah jariyah panjenengan

semua," pungkasnya.

Tak hanya itu, dukungan pendidikan juga dilakukan sistem pencakokan. Seperti yang dilakukan Jawa Timur bekerjasama dengan berbagai universitas level dunia di daerah, seperti King's College London, Western Sydney University, dan yang akan datang Queen Mary University of London (QMUL). "Keinginan mencangkok pendidikan seperti King's College London dilakukan untuk menguatkan SDM di Jatim," jelasnya.

Berkat dedikasi ini, Jawa Timur telah banyak memetik buah hasil. Sebab, baru-baru ini, Gubernur Khofifah

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

Peringatan Hari Bakti ke-78 TNI AU, DPRD Kabupaten Malang Beri Apresiasi



Kegiatan bakti sosial yang digelar oleh TNI AU dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU ke-78 di Kantor Desa Saptorenggo, Pakis, Kabupaten Malang.

KAB.MALANG, BN - DPRD Kabupaten Malang menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan bakti sosial yang digelar oleh TNI Angkatan Udara dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU ke-78 di Kantor Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Jum'at (25/7).

Kegiatan sosial yang diprakarsai oleh Lanud Abdulrahman Saleh ini dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian TNI AU terhadap kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Abdulloh Satar, SE, MM yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi seperti ini sangat penting dalam membangun sinergi antara institusi negara dan masyarakat.

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

80
Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

MKKS
SMA NEGERI
MAGETAN

Mengucapkan

DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2025

ARIS SUDARMONO

Made with twibbonize